

**FENOMENA ISLAMOFOBIA DI KOREA SELATAN TERHADAP
KOMUNITAS MUSLIM MELALUI PERSPEKTIF KEKERASAN
KULTURAL (2017-2022)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AJENG YUKITA SHOLAH

21323311

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**FENOMENA ISLAMOFOBIA DI KOREA SELATAN TERHADAP
KOMUNITAS MUSLIM MELALUI PERSPEKTIF KEKERASAN
KULTURAL (2017-2022)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AJENG YUKITA SHOLAH

21323311

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Fenomena Islamofobia di Korea Selatan Terhadap Komunitas Muslim Melalui Perspektif Kekerasan Kultural (2017-2022)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

19 November 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Khairul Munzilin, S.IP., M. A.
3. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
4. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
Pernyataan Integritas Akademik.....	ix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Cakupan penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.6 Kerangka Pemikiran.....	14
1.7 Argumen Sementara.....	23
1.8 Metode Penelitian.....	24
1.8.1 Jenis Penelitian.....	24
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	24
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
1.8.4 Proses Penelitian.....	25
1.9 Sistematika Pembahasan.....	26
BAB 2.....	27
BENTUK-BENTUK ISLAMOFobia DAN FENOMENA ISLAMOFobia	
DI KOREA SELATAN.....	27
2.1 Komunitas Muslim dan Fenomena Islamofobia di Korea Selatan.....	27
2.2 Sikap Pemerintah Korea Selatan Merespons Fenomena Islamofobia.....	44
BAB 3.....	48
BENTUK-BENTUK KEKERASAN KULTURAL YANG DILAKUKAN	
OLEH MASYARAKAT KOREA SELATAN TERHADAP KOMUNITAS	
MUSLIM.....	48
3.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama.....	48
3.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi.....	59
3.3 Kekerasan Kultural dalam Aspek Bahasa.....	64
3.4 Kekerasan Kultural dalam Aspek Seni.....	71
BAB 4.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....83

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Spanduk yang bertuliskan “muslim yang mengeksekusi orang secara brutal dan memenggal kepala mereka, keluarlah dari area ini sekarang juga”70
- Gambar 2. Spanduk lain yang bertuliskan “ga semua muslim adalah teroris, tapi semua teroris adalah muslim”70
- Gambar 3. Webtoon di Korea Selatan yang menggambarkan komunitas muslim sebagai kelompok teroris.....75
- Gambar 4. Beberapa scene drama dalam film *Man Who Dies to Live*, beberapa perempuan berhijab mengenakan bikini dan adegan lain yang menunjukkan pemeran utama menginjakkan kaki di dekat kitab suci.....75
- Gambar 5. Salah satu scene drama dalam film *The K2*, di mana seorang karakter Muslim bernama Raniya ditampilkan melepas hijabnya dan kemudian berciuman dengan karakter utama.....76

DAFTAR SINGKATAN

ISIS (Islamic State Iraq and Syria)

KMF (Korea Muslim Federation)

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)

OIC (Organization Islamic Cooperation)

NHRCK (National Human Right Commision of Korea)

KOSIS (Korean Statistic Information Service)

MBC (Munhwa Broadcasting Corporation)

ABSTRAK

Isu fenomena islamofobia dan kekerasan kultural terhadap kelompok minoritas merupakan salah satu isu yang sering terjadi di Korea Selatan. Islamofobia itu bukan hanya praktik diskriminasi saja, melainkan juga manifestasi dari kekerasan kultural yang membuat sikap dan tindakan diskriminasi terhadap komunitas muslim dianggap wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan konsep kekerasan kultural Johan Galtung dalam meninjau kekerasan kultural yang terjadi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan. Melalui teori temuan penelitian didapatkan dan dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim dengan menggunakan beberapa aspek yang relevan yaitu aspek agama, ideologi, bahasa dan seni. Hasil dari penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah terkait bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural terjadi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan karena adanya ajaran agama kristen konservatif yang mayoritas masih kuat, budaya homogen dan nasionalisme etnik yang kuat serta budaya bahasa dan seni yang masih mendominasi. Budaya-budaya ini menganggap bahwa komunitas atau etnis lainnya sebagai objek yang rendah dan tidak setara, sehingga memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan kultural.

Kata kunci: Fenomena Islamofobia, Kekerasan Kultural, Komunitas Muslim, Masyarakat, Korea Selatan.

ABSTRACT

The issue of Islamophobia and cultural violence against minority groups is one that frequently occurs in South Korea. Islamophobia is not only a practice of discrimination, but also a manifestation of cultural violence that makes discriminatory attitudes and actions against Muslim communities seem normal. This study aims to analyze the forms of cultural violence perpetrated by South Korean society against Muslim communities in South Korea. The research framework uses Johan Galtung's concept of cultural violence to examine the cultural violence that occurs against Muslim communities in South Korea. Through the research findings, it was possible to identify the forms of cultural violence committed by South Korean society against the Muslim community using several relevant aspects, namely religion, ideology, language, and art. The results of this study successfully answer the research question regarding the forms of cultural violence against the Muslim community in South Korea due to the majority's strong conservative Christian teachings, homogeneous culture, strong ethnic nationalism, and the dominance of language and art culture. These cultures consider other communities or ethnicities as inferior and unequal, thereby triggering various forms of cultural violence.

Keywords: The Phenomenon of Islamophobia, Cultural Violence, Muslim Community, Society, South Korea.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

19 November 2025,



Ajeng Yukita Sholah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena islamofobia sendiri merupakan suatu bentuk prasangka, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan umat muslim yang muncul dan berkembang sebagai fenomena sosial global. Secara historis, fenomena islamofobia ini bukanlah hal yang baru, fenomena ini telah ada sejak abad pertengahan terutama selama perang salib pada abad ke-11 hingga abad ke-13 ketika dunia Kristen Eropa dan dunia muslim mengalami konflik berkepanjangan. Pada masa itu, ajaran Islam dan umat muslim sering dipandang sebagai ancaman oleh masyarakat Eropa. Pada era modern, fenomena islamofobia semakin meluas dan menjadi intensif karena dampak dari interaksi sosial-politik yang sangat kompleks (Moordiningsih 2004). Hal ini pun berlanjut hingga abad ke-20 dan menjadi semakin tajam setelah peristiwa terorisme global seperti serangan 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat (Moordiningsih 2004).

Islamofobia itu juga sering diartikan sebagai permusuhan tidak mendasar kepada ajaran agama Islam dan umatnya atau juga dapat dikatakan sebagai suatu yang anti terhadap agama Islam dan ajarannya (Putri et al. 2022). Fenomena islamofobia mengakibatkan umat muslim secara kolektif di stigmatisasi sebagai teroris atau ancaman keamanan oleh media dan sebagian masyarakat Barat. Fenomena islamofobia ini pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang signifikan, mulai dari diskriminasi sosial, pelecehan verbal dan fisik hingga pembatasan kebebasan beragama dan beraktivitas sosial umat muslim. Oleh

karena itu, penelitian ini diperlukan guna untuk pemahaman yang bersifat komprehensif terkait dengan fenomena islamofobia di Korea Selatan untuk dibahas guna untuk membangun sikap saling menghargai dan harmonisasi antar umat beragama di era globalisasi ini saat ini (Moordiningsih 2004).

Sementara itu, fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan yang mana Korea Selatan sendiri merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang dimana masyarakat muslimnya terbilang masih minoritas. Islam sendiri merupakan agama yang minoritas di Korea Selatan dan umat Islam sering menghadapi diskriminasi serta prasangka buruk (Han, Sang Y. 2017). Hal ini sebagian disebabkan oleh konteks budaya dan sejarah negara tersebut. Kemudian daripada itu, munculnya dinamika kekerasan kultural terhadap komunitas muslim tidak terlepas dari fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan yang dikaitkan dengan kebangkitan dari kelompok *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS) serta juga dengan meningkatnya kehadiran para pekerja migran muslim (Mukhtar and Sasongko 2021). Dan juga kurangnya undang-undang dan kebijakan dari pemerintah yang komprehensif terhadap masalah diskriminasi berdasarkan agama, gender, orientasi seksual, ras dan faktor lainnya juga telah berkontribusi dengan terjadinya diskriminasi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan (Han, Sang Y. 2017).

Data yang spesifik terkait dengan fenomena islamofobia di Korea Selatan mulai dari tahun 2017–2022 sangat sedikit yang dipublikasikan dalam jurnal akademik atau laporan resmi yang mudah diakses. Namun, studi kasus dan data terkait dari literatur yang ada, sekaligus menunjukkan keterbatasan data masih dapat ditampilkan seperti studi kasus penolakan masjid di daerah Daegu pada

tahun 2020-2021. Menurut laporan dari beberapa jurnal tentang pembangunan masjid untuk komunitas muslim yang ada di wilayah Daehyeon-dong Daegu, sekitar 80–150 orang yang sebagian terdiri dari mahasiswa dan staf universitas mendapat oposisi dari penduduk lokal pada Desember 2020. Kemudian disisi lain pekerjaan pembangunan dihentikan oleh kantor administratif distrik pada tahun 2021 setelah protes masyarakat. Komisi HAM Nasional Korea (National Human Rights Commission of Korea, NHRCK) menilai bahwa beberapa tindakan masyarakat seperti pesan penghinaan dan simbolisme babi yang sangat sensitif dalam ajaran agama Islam di dekat lokasi pembangunan memenuhi unsur diskriminasi berbasis agama.

Kemudian terdapat survei diskriminasi terhadap warga asing pada tahun (2022) dalam penelitian oleh Putri, Alunaza, Shafitri & Ernianda (2022), mereka menggunakan data survei terhadap 310 warga asing di Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 68,4% responden menyatakan pernah mengalami diskriminasi rasial dari masyarakat lokal Korea Selatan. Alasan diskriminasi terjadi dikarenakan kemampuan bahasa Korea rendah sebanyak 62,3% responden, bukan masyarakat negara Korea sebanyak 59,7% dan perbedaan ras sebanyak 44,7%. Karena sebagian besar para pekerja migran muslim mungkin termasuk dalam responden ini, data ini memberikan indikasi bahwa sebagian komunitas muslim yang berstatus sebagai imigran asing merasakan diskriminasi struktural atau sosial meski tidak semua kasus dapat dikategorikan sebagai fenomena islamofobia murni berdasarkan agama.

Kemudian dalam jurnal artikel Sakinah & Kurniawati (2024), menyatakan bahwa sejak 2018 sampai sekitar 2023 telah terjadi eskalasi kekhawatiran terkait

diskriminasi HAM yang dialami komunitas muslim yang ada di Korea Selatan, seperti propaganda anti-Islam, ketidaktahuan tentang Islam dan stereotip terorisme yang semakin memperparah situasi. Mereka menunjukkan bahwa diskriminasi ini bukan hanya sebatas prasangka sosial, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak-hak minoritas, terutama bagi migran komunitas muslim. Pada tahun 2017, tercatat bahwa sebuah *Citizens' Association for a Proper Country* di Korea Selatan menggalang petisi menentang pembangunan ruang doa atau fasilitas Muslim di wilayah Gangwon yang terkait dengan Olimpiade PyeongChang, mereka mengekspresikan kekhawatiran tentang radikal Islam. Petisi ini mendapat lebih dari 56.000 tanda tangan online, hal ini menunjukkan bahwa adanya basis sosial yang signifikan untuk sentimen anti komunitas muslim.

Kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan tidak terlepas dari warisan budaya yang kuat serta nilai-nilai sosial konservatif. Masyarakat Korea Selatan sendiri juga memiliki kekurangan mengenai pemahaman tentang Islam, sehingga oleh ketidaktahuan itu mengakibatkan mereka selalu memiliki stereotip negatif tentang umat Islam (Putri, Anggi 2022). Contoh nyata dari adanya fenomena islamofobia di Korea Selatan ini adalah tindakan diskriminatif terhadap komunitas muslim seperti penolakan pembangunan masjid di Daegu yang dipicu oleh masyarakat setempat yang menolak keberadaan masjid dengan alasan bahwa masjid akan mengubah lingkungan menjadi daerah kantong muslim dan kumuh yang dipenuhi kejahatan (Tejomukti and Sasongko 2022). Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan kebijakan yang tidak mendukung hak-hak minoritas dalam beragama.

Korea Selatan sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman agama meskipun pemerintahnya tidak mewajibkan bagi masyarakatnya untuk memiliki agama (Nurhalisa 2021). Jika kita kembali melihat sejarah, Korea Selatan sendiri telah memiliki hubungan dengan ajaran Islam sejak daratan Korea diduduki oleh dinasti Silla. Korea Selatan juga merupakan negara yang pernah memiliki hubungan erat dengan Turki (Nurhalisa 2021). Sebagian besar warga yang beragama Islam di Korea Selatan adalah para imigran, dan jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 hingga 200.000 orang (Subroto dan Ningsih 2022). Perkembangan Islam di Korea Selatan tentunya mempengaruhi beberapa aspek kehidupan bangsa Korea, termasuk politik dan ekonomi. Di beberapa negara, agama Islam menghadapi masa yang cukup sulit untuk bangkit kembali dari pandangan negatif karena isu islamofobia yang muncul di lingkungan masyarakat dunia (Damayanti, Robertua dan Mulyaman 2022). Hal yang sama pun tentunya juga terjadi di setiap negara yang masyarakat muslimnya masih terbilang minoritas seperti Korea Selatan.

Homogenitas etnis ini menjadi landasan bagi identitas nasional Korea Selatan dan terus dijaga serta dikembangkan sebagai kebanggaan nasional. Masyarakat Korea Selatan secara umum memiliki kultur, bahasa, adat, dan nilai-nilai sosial yang seragam. Pengalaman sejarah yang panjang sebagai bangsa yang mengalami penjajahan dan perjuangan mempertahankan identitasnya juga memperkuat paradigma masyarakat homogen ini (Umayyatun 2017). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan sosial dan demografis mulai menantang asumsi masyarakat Korea Selatan yang homogennya tinggi. Urbanisasi pesat dan masuknya imigran dari berbagai negara di Asia mulai mengubah

lanskap sosial menjadi lebih multikultural. Fenomena pernikahan antar ras dan etnis yang meningkat turut menandai perubahan sosial yang signifikan, meskipun kesadaran dan penerimaan terhadap keberagaman ini masih dalam tahap perkembangan dan tidak selalu mudah diterima oleh sebagian masyarakat (Umayyatun 2017).

Homogenitas yang terjadi di Korea Selatan ini juga berkontribusi pada masalah sosial seperti diskriminasi etnis dan rasisme terhadap warga asing dan kelompok minoritas seperti komunitas Muslim. Ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi keberagaman etnis menyebabkan berbagai tantangan dalam proses integrasi sosial dan pembentukan masyarakat multikultural yang inklusif di Korea Selatan saat ini. Kemudian terkait dengan adanya budaya konsumerisme dan materialisme yang kuat di Korea Selatan serta dengan kurangnya edukasi dan kesadaran terkait dengan agama Islam dan budaya muslim tentunya akan menjadi masalah dalam kebijakan hukum dari pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi isu fenomena islamofobia (You, Kim, dan Kim 2014).

Realitas perbedaan dalam beragama itu merupakan hal yang cukup krusial dan memang masih sangat lebih sensitif jika dibandingkan dengan keberagaman lainnya (Putri et al. 2022). Dari hal inilah yang pada akhirnya memunculkan stigma buruk bahwa Islam itu merupakan agama yang konservatif, sehingga tidak bisa di pungkiri lagi eksistensi dari budaya islamofobia ini akhirnya meningkat dengan pesat seiring berjalannya waktu (Putri et al. 2022). Tindakan diskriminasi dan rasisme tentunya juga selalu dialami oleh kelompok etnis, pekerja migran hingga komunitas muslim, dalam bentuk kekerasan verbal, pengucilan hingga

hambatan sistemik. Hal ini terjadi, karena masyarakat Korea Selatan itu sangat menjunjung identitas etnis tunggal (Putri, Anggi 2022).

Komunitas muslim tentunya kerap mengalami rasisme seperti kekerasan verbal dan pengucilan akibat fenomena islamofobia yang masih ada secara langsung, secara struktural dan kultural. Masyarakat Korea Selatan cenderung dominan secara etnis, sehingga nilai-nilai kolektif sering menekan keberagaman. Dan juga di Korea Selatan sendiri saat ini masih belum memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif. Upaya legislasi berulang kali ditolak karena tekanan kelompok-kelompok konservatif. Nilai-nilai konfusianisme dan nasionalisme memperkuat identitas tunggal dan membatasi penerimaan terhadap budaya dan kelompok baru. Pada awalnya Korea Selatan memang negara yang memiliki masyarakat monoetnis dikarenakan sedikitnya para imigran yang datang untuk bermigrasi di Korea Selatan. Akan tetapi, setelah melonjaknya pertumbuhan ekonomi serta dampak dari perubahan zaman akibat globalisasi, Korea Selatan pada akhirnya telah berubah menjadi negara yang memiliki berbagai macam etnis (Han, Sang Y. 2017).

Diskriminasi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan seringkali juga dipicu oleh propaganda anti agama Islam, kurangnya pemahaman tentang Islam dan persepsi global terkait terorisme agama. Sakinah dan Kurniawati (2024) menemukan dan berpendapat bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebencian terhadap komunitas muslim, hal ini menunjukkan bahwa fenomena islamofobia bukan sekadar tindakan langsung tapi juga tertanam dalam struktur sosial masyarakat (Sakinah dan Kurniawati 2024). Adanya fenomena islamofobia tentunya juga dapat

menyebabkan para masyarakat muslim di Korea Selatan merasa terisolasi dan tidak mendapatkan kesempatan berbagi dengan masyarakat lainnya (Handayani dan Nasrullah 2021). Penerimaan secara menyeluruh terkait dengan ajaran Islam dan komunitas muslim yang ada di Korea Selatan itu mustahil terjadi, hal ini tentunya disebabkan oleh perbedaan ajaran dan kultur yang ada di Korea Selatan itu sendiri.

Penelitian ini menghadapi keterbatasan data kuantitatif terkait fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan, karena tidak terdapat survei nasional atau laporan resmi yang mencatat insiden fenomena islamofobia secara rutin setiap tahun dimulai dari tahun 2017 hingga 2022. Untuk mengatasi keterbatasan ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan triangulasi data, yang meliputi analisis literatur akademik, laporan kelompok hak asasi manusia dan studi kasus yang terdokumentasi. Studi kasus dipilih berdasarkan relevansi dan dampak sosialnya, seperti penolakan pembangunan masjid di Daegu dan pengalaman diskriminasi para pekerja muslim migran di Korea Selatan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggambarkan tren fenomena islamofobia secara kultural dan simbolik, meskipun tidak dalam bentuk angka tahunan resmi. Dengan metode ini, penelitian tetap dapat menganalisis dampak fenomena islamofobia terhadap komunitas muslim, menyoroti bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan terkait dengan adanya fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2017 hingga 2022. Hal yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan akan digunakan nantinya dalam

penelitian skripsi ini, yang nantinya akan mencakup pembahasan serta analisis secara komprehensif terkait dengan penjelasan bagaimana komunitas muslim yang ada di Korea Selatan ini mengalami kekerasan kultural selama periode 2017-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim di Korea Selatan selama periode 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena islamofobia yang dialami komunitas Muslim di Korea Selatan pada periode 2017–2022 melalui perspektif kekerasan kultural Johan Galtung. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan kultural yang muncul dalam kehidupan sosial, politik dan budaya, serta memahami bagaimana nilai, simbol dan narasi dalam masyarakat Korea Selatan turut melegitimasi dan menormalisasi diskriminasi tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan dampak islamofobia terhadap kehidupan komunitas muslim sebagai kelompok minoritas, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika intoleransi dan keberagaman budaya di Korea Selatan.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini memfokuskan analisis bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan selama periode tahun 2017-2022. Penelitian ini dimulai pada tahun 2017 karena sejak tahun ini muncul indikasi kuat peningkatan sentimen fenomena islamofobia, ditandai dengan petisi publik berskala besar yang menolak fasilitas Muslim, meningkatnya resistensi terhadap pembangunan masjid, serta intensifikasi diskursus publik yang memosisikan Islam sebagai ancaman budaya di Korea Selatan (Putri 2022, Ji-Hye 2021). Di sisi lain, pemerintah dan aktor pariwisata ingin menjadikan Korea Selatan menjadi negara yang lebih *Muslim-friendly* (Hilwa 2021), sehingga memicu perdebatan publik terkait keberadaan fasilitas keagamaan dan keberagaman budaya yang mengakibatkan munculnya kasus-kasus tindakan diskriminasi dan rasisme. Kemudian tahun 2022 dipilih sebagai batas akhir penelitian ini karena pada tahun ini konflik lokal terkait pembangunan masjid di Daegu yang melibatkan aksi simbolis mencapai fase eskalasi publik dan berakhir pada pengajuan petisi kepada mekanisme hak asasi internasional serta tidak terlepas dari respon pemerintah Korea Selatan yang juga mulai melakukan dukungan terhadap komunitas muslim, seperti dukungan dalam kebijakan halal serta peningkatan dukungan untuk pariwisata muslim. Penelitian ini membatasi cakupan untuk di tahun 2023 hingga saat ini karena kurangnya ketersediaan data dan tinjauan literatur akademik yang memadai mengenai fenomena islamofobia dan kekerasan kultural yang terjadi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan. Meskipun terdapat beberapa indikasi kekerasan langsung dan struktural, data empiris yang tersedia masih terbatas dan tidak

memadai untuk dianalisis secara komprehensif, sehingga penelitian ini tidak meninjau kekerasan langsung dan struktural secara mendetail. Dengan demikian, penelitian tetap konsisten pada tujuan awal, yaitu untuk memahami dominasi kekerasan kultural dalam konteks fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan hingga tahun 2022. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh komunitas muslim di Korea Selatan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan selama periode tahun 2017-2022.

1.5 Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya mengenai masalah islamofobia yang telah dilakukan. Dalam penulisan penelitian ini dilakukan tinjauan literatur untuk mendapatkan referensi serta analisis dan konsep dalam penelitian ini. Sebuah jurnal artikel yang ditulis oleh Nabila Paradays pada tahun 2020, dalam jurnal ini membahas perkembangan Islam dan komunitas muslim di Korea Selatan yang beragam mulai dari tahun 1990-2020. Korea Muslim Federation (KMF) sendiri menjembatani hubungan antara minoritas muslim di Korea dengan komunitas muslim global, membangun jaringan dan berupaya menyebarkan Islam secara luas di Korea Selatan (Paradays 2022). Kemudian Nabila juga menjelaskan bahwa Islam di Korea Selatan hadir sebagai komunitas minoritas melalui koneksi dan jaringan yang di bangun oleh Korea Muslim Federation dengan komunitas muslim global, baik Islam maupun komunitas muslim telah menerima banyak dukungan dan kebaikan dari berbagai organisasi muslim global (Paradays 2022). Topik dan fokus utama yang dibahas dalam jurnal Nabila Paradays berbeda dengan yang akan penelitian ini bahas, Nabila Paradays membahas mengenai perkembangan Islam di Korea Selatan, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan.

Kemudian tinjauan literatur yang kedua adalah jurnal Angel Damayanti, Verdinand Robertua dan Darynaufal Mulyaman pada tahun 2022 yang menjelaskan mengenai akar penyebab dan dampak islamofobia di India, Myanmar, Thailand serta Korea Selatan dan juga menurut mereka organisasi regional harus berperan dalam mengatasi masalah ini (Damayanti, Robertua, dan

Mulyaman 2022). Dalam jurnal ini menurut Angel Damayanti, Verdinand Robertua dan Darynaufal Mulyaman, penyebab islamofobia itu berkisar dari masalah sejarah kolonialisme, konflik agama antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam kerangka sosial politik, isu separatisme, dan peran media yang memberikan stigmatisasi terhadap umat Islam (Damayanti, Robertua, dan Mulyaman 2022). Fokus jurnal Angel Damayanti, Verdinand Robertua dan Darynaufal Mulyaman ini sendiri adalah mengenai peran ASEAN (Association South East sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dan bermitra dengan negara-negara Indo-Pasifik dan ASEAN harus mengatasi masalah ini sekaligus menyelesaikan tantangan internalnya (Damayanti, Robertua, dan Mulyaman 2022). Dari hal ini pun terlihat bahwa fokus pembahasan yang akan dibahas berbeda dengan yang akan penelitian ini bahas.

Lalu untuk tinjauan literatur yang ketiga jurnal ini ditulis oleh Sang Yong Han pada tahun 2017, dalam jurnalnya Sang Yong Han mengulas beberapa isu islamofobia dan bagaimana umat Islam sering digambarkan secara negatif atau stereotip di negara-negara Barat. Dalam jurnal ini Sang Yong Han menjelaskan mengapa sikap islamofobia sangat meluas di kalangan sektor tertentu termasuk politisi sayap kanan dan Protestan di negara tersebut antara tahun 2014 dan 2016 (Han 2017). Menurut Sang Yong Han Minoritas sendiri sudah ada sejak tahun 1990-an di Korea Selatan, satu dekade sebelum 9/11 (Han 2017). Sang Yong Han juga menuliskan bahwa terjadi perdebatan yang dimana dikatakan bahwa muslim bisa menjadi ancaman keamanan atau budaya sehingga harus diasimilasikan ke dalam masyarakat Korea yang relatif homogen telah terjadi (Han 2017). Fokus dan topik pembahasan utama dalam jurnal Sang Yong Han ini berbeda dengan

yang akan penelitian ini bahas, disini penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan.

Dari ketiga tinjauan literatur terdahulu, semuanya sangat bermanfaat dan sangat berwawasan luas sehingga memberikan ide dan pengetahuan bagi penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan utamanya yaitu kekerasan kultural, untuk saat ini masih belum ditemukan kajian atau penelitian yang membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan selama periode tahun 2017 hingga 2022. Dengan referensi khusus pada permasalahan kekerasan kultural terhadap komunitas muslim.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini akan berlandaskan konsep pemikiran kekerasan kultural yang dicetuskan oleh Johan Galtung (1990) melalui jurnal penelitiannya yang berjudul *Cultural Violence*. Konsep kekerasan kultural oleh Johan Galtung ini digunakan dalam penulisan karena relevansinya dengan penulisan ini. Kemudian dalam hal ini, Johan Galtung sendiri membagi kekerasan itu kedalam tiga bentuk kekerasan atau yang lebih dikenal dengan segitiga kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

Penelitian ini hanya menggunakan konsep kekerasan kultural dari Johan Galtung sebagai satu-satunya kerangka analisis karena fenomena islamofobia yang di Korea Selatan terjadi lebih dominan di ranah simbolik, normatif dan

sosial-kultural daripada melalui kekerasan fisik dan struktural. Fokus penelitian pada kekerasan kultural ini dipilih karena kekerasan ini terdokumentasi lebih luas melalui media dan literatur akademik, sehingga memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh dan sistematis sesuai dengan kerangka konsep pemikiran Galtung serta juga memberikan pemahaman yang lebih tepat dan terarah terhadap legitimasi simbolik dan fenomena sosial islamofobia, sehingga sesuai dengan konteks minoritas yang terjadi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan.

Konsep kekerasan budaya atau *Cultural Violence* dari Johan Galtung ini merupakan salah satu dari tiga bentuk kekerasan yang ia konsepsikan. Kekerasan kultural dan struktural itu dikategorikan sebagai kekerasan yang tidak terlihat, sedangkan kekerasan langsung dikategorikan sebagai kekerasan yang terlihat. Kekerasan kultural merupakan pendorong utama terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang berkembang di masyarakat (Galtung 1990). Galtung mendefinisikan *Cultural Violence* atau kekerasan budaya sebagai salah satu bentuk kekerasan yang bersifat simbolik dan berasal dari kultur atau budaya suatu masyarakat itu sendiri. Galtung juga menegaskan bahwa dalam membahas budaya itu bukan merupakan wujud dari budaya itu secara keseluruhan, melainkan juga harus membahas aspek-aspek yang ada di dalam budaya itu sendiri. Tentunya dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang memicu terjadinya kekerasan kultural yaitu **Agama, Ideologi, Bahasa, Seni, Ilmu Empiris, Ilmu Formal, dan Kosmologi** yang mana aspek-aspek ini dapat melegitimasi atau membenarkan kekerasan, baik itu kekerasan langsung maupun kekerasan struktural (Galtung 1990).

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan budaya merupakan bentuk kekerasan yang tersembunyi dan tertanam dalam sistem budaya masyarakat yang mempengaruhi cara pandang masyarakat sehingga tindakan kekerasan menjadi tampak sah atau dibenarkan secara kultural. Kekerasan ini sulit diperkirakan karena seringkali tidak terlihat sebagai kekerasan secara eksplisit, melainkan melalui simbol dan praktik budaya yang mendukung ketidakadilan dan diskriminasi (Galtung 1990). Galtung juga berpendapat bahwa kekerasan budaya ini tidak selalu tampak secara fisik, mereka berperan sebagai landasan pemikiran yang membuat tindakan diskriminasi, ketidakadilan atau bahkan penindasan menjadi dianggap normal, wajar dan bahkan dinilai benar oleh masyarakat. Dengan demikian, kekerasan budaya merupakan pondasi penting yang memungkinkan kekerasan lain bertahan dan tersembunyi dalam kehidupan sosial (Galtung 1990).

Dengan kata lain, kekerasan kultural juga bisa disebut sebagai kekerasan yang tersembunyi dalam kebudayaan dan diyakini sebagai sesuatu yang benar, sehingga kekerasan yang terjadi dianggap sah atau wajar oleh masyarakat. Kekerasan kultural juga mengaburkan realitas sehingga fakta kekerasan tidak terlihat sebagai kekerasan. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan ini berfungsi untuk mendukung dan memperkuat kekerasan langsung dan struktural dengan cara mengubah persepsi sosial agar kekerasan tersebut dianggap diterima atau tidak salah. Singkatnya, kekerasan kultural merupakan sistem simbol dan nilai dalam kebudayaan yang membenarkan berbagai bentuk kekerasan lain dalam masyarakat secara tidak langsung melalui legitimasi dan pembenaran sosial atas tindakan-tindakan kekerasan yang ada (Galtung 1990).

Kemudian dalam jurnal *Cultural Violence* (1990), Galtung memetakan tujuh aspek utama kekerasan kultural atau bentuk-bentuk kekerasan kultural. Konsep aspek-aspek dalam kekerasan kultural ini juga akan digunakan sebagai kerangka pemikiran pendukung terkait pembuktian bentuk-bentuk kekerasan kultural yang terjadi. Terdapat uraian penting terkait bentuk-bentuk kekerasan kultural. Poin-poin ini merupakan sebagian dari keseluruhan poin-poin yang telah ditulis dalam konsep pemikiran oleh Johan Galtung, adapun penjelasan bentuk ketujuh aspek-aspek kekerasan kultural dalam jurnal Galtung yaitu:

1. **Aspek Agama** sebagai doktrin atau tafsir keagamaan yang menjustifikasi kekerasan atau superioritas kelompok tertentu. Galtung juga menjelaskan bahwa pada dasarnya ajaran agama atau doktrin suatu agama itu dapat digunakan untuk hal yang benar maupun hal yang salah. Contoh yang Galtung sebutkan termasuk gagasan “bangsa/umat terpilih” yang memberi pembenaran moral untuk menindas pihak lain. Agama juga merupakan sistem kepercayaan dan ritual tertentu yang mana ajaran agama itu dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan kultural. Dapat dianalogikan juga bahwa hal-hal baik itu berasal dari tuhan sedangkan hal-hal salah itu berasal dari setan. Sehingga dapat dipahami bahwasanya jika sebuah doktrin atau ajaran agama diterapkan dalam ajaran yang salah, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan kultural. Dalam jurnal tulisan Galtung juga terdapat tabel yang menjelaskan terkait hal yang terpilih dan yang tidak terpilih.

Tabel 1. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih dalam Aspek Agama

Pilihan Tuhan	Bagian Setan	Konsekuensinya
Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Ekosida, Spesiesme
Laki-laki	Wanita	Seksisme, Pembakaran tukang sihir
Umatnya	Umat lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Bewarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas bawah	Eksplorasi, Klasisme
Kepercayaan yang benar	Aliran sesat atau kafir	Meritisme, Inkuisisi

Sumber : Cultural Violence (Galtung 1990).

Berdasarkan tabel, penjelasan yang terpilih itu berasal dari Tuhan sedangkan yang tidak terpilih itu berasal dari setan, yang mana keduanya ini memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang terpilih itu adalah manusia, laki-laki, umatnya, kulit putih, kelas atas, dan kepercayaan yang benar sedangkan yang tidak terpilih adalah hewan, tumbuhan, alam, wanita, umat lain, berwarna, kelas bawah, dan aliran sesat/kafir. Kemudian dari hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindakan rasisme, seksisme, klasisme, kolonialisme, diskriminasi kelas, dan eksploitasi (Galtung 1990).

2. **Aspek Ideologi** sebagai sistem pemikiran politik, nasionalisme atau keyakinan negara-bangsa yang memberi alasan “logis” bagi kekerasan, seperti perang demi mempertahankan identitas atau keamanan. Contoh aspek ideologi yang galtung sebutkan adalah seperti menganggap satu ras, etnis atau bangsa lebih unggul dari yang lain. Aspek ideologi juga berfungsi sebagai sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang menormalkan dan merasionalisasi kekerasan dan ketidaksetaraan. Dalam ideologi sebuah negara, hal ini akan dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama didalam suatu negara. Galtung juga menjelaskan bahwa jika terkadang negara itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari tuhan yang memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan. Melalui aspek ideologi ini, kekerasan dapat dianggap sebagai sesuatu yang perlu, wajar atau bahkan suci sehingga sulit dilawan karena sudah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat itu sendiri (Galtung 1990).
3. **Apek Bahasa** sebagai cara berbahasa yang menutupi atau menormalisasi ketidaksetaraan, misalnya seperti istilah yang menghilangkan eksistensi perempuan atau penggunaan metafora yang membuat kekerasan tampak wajar. Bahasa dalam hal ini juga dapat menjadi salah satu unsur dari kekerasan kultural. Hal ini dapat terjadi ketika bahasa itu sendiri digunakan untuk mendiskriminasi atau berprasangka terhadap suatu kelompok tertentu melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Bahasa juga merupakan media yang dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai budaya yang dapat melegitimasi kekerasan. Biasanya, hal ini dilakukan melalui penggunaan istilah, narasi, dan ekspresi tertentu (Galtung 1990).

4. **Aspek Seni** sebagai representasi budaya, seni atau media yang mengabadikan stereotip dan memupuk citra negatif suatu kelompok, sehingga masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai kekerasan. Seni dalam hal ini juga dapat menjadi pemicu kekerasan ketika sebuah karya seni itu menggambarkan atau memuat simbol dan pesan kepada kelompok tertentu yang memuat pesan norma kekerasan atau pesan diskriminatif dan negatif terhadap suatu kelompok. Seni juga menjadi medium simbolik yang mengabsahkan struktur kekerasan kultural di masyarakat (Galtung 1990).
5. **Aspek Ilmu Empiris** sebagai ilmu pengetahuan “ilmiah” yang bias, seperti riset rasis atau statistik yang menjustifikasi diskriminasi atas nama sains (Galtung 1990).
6. **Aspek Ilmu Formal** sebagai ilmu logika, matematika atau kerangka berpikir abstrak yang dipakai untuk menjustifikasi hierarki sosial dan ketidaksetaraan, seolah-olah keputusan kejam hanyalah konsekuensi rasional (Galtung 1990).
7. **Aspek Kosmologi** Sebagai pandangan dunia dan asumsi mendasar tentang “tatanan alam” yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pusat dan yang lain di pinggiran. Galtung menyebutnya sebagai “kode genetik budaya” yang mendefinisikan apa yang dianggap normal dan alamiah (Galtung 1990).

Ketujuh bentuk aspek ini, menurut Galtung, tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi menyediakan landasan moral, simbolik dan intelektual yang membuat

kekerasan langsung maupun struktural terlihat sah atau bahkan tak terlihat sebagai kekerasan (Galtung 1990).

Dalam penelitian ini, hanya empat indikator yang akan digunakan dalam penulisan yaitu agama, ideologi, bahasa dan seni, karena relevansinya yang paling kuat terhadap dinamika fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan. Pertama, aspek agama dipilih karena fenomena islamofobia secara langsung terkait dengan perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, di mana kelompok mayoritas akan menggunakan ajaran dan retorika keagamaan untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kedua, aspek ideologi dipilih karena narasi nasionalisme dan retorika politik yang mengaitkan islam dengan ancaman terhadap identitas bangsa Korea memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat menolak komunitas Muslim. Ketiga, aspek bahasa dipilih karena media, publikasi dan retorika kelompok konservatif menggunakan istilah dan framing tertentu yang membentuk stereotip negatif terhadap komunitas muslim, sehingga menciptakan legitimasi sosial. Keempat, aspek seni dipilih karena representasi simbolik dalam bentuk poster, karikatur dan media visual lain sering digunakan untuk memperkuat citra negatif terhadap kelompok komunitas muslim dan menormalisasi diskriminasi dalam ruang publik.

Sedangkan ketiga indikator lainnya yaitu ilmu empiris, ilmu formal dan kosmologi tidak digunakan dalam penelitian ini karena dampaknya terhadap fenomena islamofobia di Korea Selatan terbilang kurang signifikan atau kurang relevan. Misalnya, ilmu formal atau empiris yang lebih bersifat netral dan metodologis, sedangkan kosmologi terkait pandangan alam semesta yang bersifat

abstrak dan tidak secara langsung mempengaruhi persepsi atau sikap diskriminatif terhadap komunitas muslim di konteks lokal. Dengan demikian, fokus pada empat indikator yang lebih relevan, memungkinkan penelitian ini lebih terarah dan mampu menggambarkan secara jelas mekanisme legitimasi sosial, simbolik dan kultural dari fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan.

Oleh karena itu, aspek agama, ideologi, bahasa dan seni dianggap lebih relevan untuk menggambarkan proses kulturalisasi kekerasan yang terjadi dan membantu penelitian ini untuk menyesuaikan dengan bentuk-bentuk kekerasan kultural yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim selama kurun waktu tahun 2017-2022. Oleh karena itu, berdasarkan uraian konsep diatas maka dalam menjawab masalah ini konsep kekerasan kultural dapat secara tepat digunakan untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim di Korea Selatan. Beberapa penjelasan terkait dengan kategori kekerasan diatas dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara terkait isu ini yaitu fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan menampilkan pola **kekerasan kultural** yang sejalan dengan konsep Johan Galtung. Bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh komunitas muslim di Korea Selatan selama periode 2017-2022 dapat diidentifikasi dalam empat aspek bentuk kekerasan kultural. **Pertama, aspek agama**, sebagai doktrin atau tafsir keagamaan yang menjustifikasi kekerasan atau superioritas kelompok tertentu, seperti dalam konteks terkait dengan adanya islamofobia, yang sebagian besar berasal dari kelompok Kristen konservatif terutama dari kalangan Evangelikal Protestan. **Kedua aspek ideologi**, yang menjadi sistem pemikiran politik, nasionalisme atau keyakinan bangsa yang memberi alasan logis bagi kekerasan, seperti identitas nasional yang kuat dibangun atas dasar *danil minjok* yaitu keyakinan bahwa bangsa Korea adalah satu etnis, bersatu dalam bahasa, budaya dan sejarah yang sering kali membuat warga non-etnis atau imigran dianggap sebagai asing permanen dalam masyarakat. **Ketiga aspek bahasa**, yaitu cara berbahasa yang menutupi atau menormalisasi ketidaksetaraan, misalnya seperti penggunaan istilah negatif terhadap umat muslim dalam pemberitaan arus utama dan percakapan daring yang memperkuat stereotip ancaman terorisme. **Keempat aspek seni**, sebagai representasi budaya atau media yang mengabadikan stereotip dan memupuk citra negatif suatu kelompok, contohnya seperti penggambaran karakter muslim secara stereotip sebagai teroris dalam serial webtoon. Keempat bentuk aspek kekerasan kultural ini menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas Korea Selatan secara tidak

langsung menormalisasi sikap diskriminatif, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan keterasingan bagi komunitas muslim.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif sendiri berupaya untuk memaparkan sebuah hal secara naratif dan juga metode penelitian yang tidak berpacu terhadap bukti berdasarkan metode statistik, logika, prinsip angka, dan matematis. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan perilaku manusia serta menganalisis kualitasnya dalam mengubah menjadi entitas kualitatif (Mulyana 2013).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Fenomena Islamofobia, sedangkan objeknya adalah bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh Komunitas Muslim di Korea Selatan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumen dan catatan menggunakan buku, artikel jurnal, literatur penelitian dan studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur, artikel jurnal terdahulu untuk memahami dan menganalisis mengenai fenomena yang telah terjadi.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini menggunakan data dan dokumen dari sumber yang terpercaya dan valid, seperti jurnal, buku, dan artikel. Lalu kemudian dituliskan secara sistematis mengenai bentuk kekerasan kultural dan menganalisisnya secara lebih lanjut. Kemudian, dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang penelitian ini teliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, memberikan tinjauan pustaka dan memaparkan pertanyaan penelitian, tujuan dan cakupan penelitian serta kerangka pemikiran yang akan digunakan.

BAB 2 akan membahas mengenai awal kemunculan komunitas muslim di Korea Selatan, awal kemunculan fenomena islamofobia di Korea Selatan dan bagaimana sikap pemerintah Korea Selatan merespons fenomena islamofobia yang terjadi terhadap komunitas muslim yang ada di sana.

BAB 3 akan menganalisis mengenai bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim terkait dengan fenomena islamofobia yang terjadi selama periode 2017 hingga 2022.

BAB 4 akan menyajikan hasil yang telah ditemukan dan memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian proposal skripsi ini. Disini penelitian ini juga membuat kesimpulan yang mencakup hasil dari keseluruhan penelitian dan memberikan rekomendasi.

BAB 2

BENTUK-BENTUK ISLAMOFOBIA DAN FENOMENA ISLAMOFOBIA DI KOREA SELATAN

Dalam penulisan bab 2 ini akan berisikan mengenai pembahasan lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk islamofobia di Korea Selatan, awal kemunculan komunitas muslim di Korea Selatan, awal kemunculan fenomena islamofobia di Korea Selatan serta bagaimana sikap pemerintah Korea Selatan dalam merespons fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan.

2.1 Komunitas Muslim dan Fenomena Islamofobia di Korea Selatan

Kemunculan komunitas muslim di Korea Selatan merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas, mengingat negara Korea Selatan ini merupakan salah satu negara dengan populasi muslim yang sangat kecil. Meskipun demikian, jumlah komunitas muslim ini bertambah dan memperlihatkan sebuah dinamika yang signifikan, dari segi jumlah maupun pengaruh sosial. Korea Selatan sendiri bukanlah negara yang religius, dengan hanya 44% penduduknya yang menyatakan beragama. Namun, mereka membedakan diri dari banyak negara lain karena orang-orang dari semua sistem kepercayaan dapat hidup berdampingan secara damai (World Population 2025).

Perbedaan antara imigran dan komunitas muslim, imigran merupakan individu yang pindah dari negara asal ke negara lain untuk tujuan tinggal, bekerja atau belajar dan status mereka tidak otomatis berkaitan dengan agama. Muslim, di sisi lain, mereka adalah individu yang memeluk agama Islam, tanpa

memperhatikan kewarganegaraan atau status migrasi. Namun, sebagian besar komunitas muslim di Korea Selatan terdiri dari para imigran atau keturunan imigran, seperti pekerja migran dari Indonesia, Pakistan dan Bangladesh (Rachmah dan Jahroni 2022). Hal ini menciptakan situasi di mana diskriminasi terhadap individu sering bersifat ganda. Pertama, sebagai imigran mereka menghadapi prasangka terhadap warga asing dan hambatan integrasi sosial. Kedua, sebagai muslim mereka menghadapi diskriminasi berbasis agama, misalnya penolakan pembangunan masjid, stereotipe negatif atau retorika anti-Islam dari kelompok konservatif (Handayani & Nasrullah 2021). Dengan demikian, imigran dinilai sebagai muslim karena identitas agama mereka terlihat secara sosial melalui praktik ibadah, simbol keagamaan atau budaya yang berbeda (Sakinah & Kurniawati 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa permasalahan islamofobia di Korea Selatan sering terjadi pada interseksi status imigran dan minoritas agama, sehingga pengalaman diskriminasi tidak hanya terkait dengan kewarganegaraan tetapi juga identitas keagamaan (Umayyatun 2018).

Komunitas Muslim di Korea Selatan merupakan kelompok minoritas agama yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan mayoritas penduduk Korea, yang beragama Buddha, Kristen atau tidak memiliki agama. Meskipun jumlahnya terbatas, komunitas muslim ini sangat heterogen, terdiri dari muslim Korea asli, imigran muslim, serta mahasiswa dan profesional muslim dari berbagai negara. Muslim Korea asli sebagian besar berasal dari keluarga yang sudah memeluk Islam sejak beberapa dekade terakhir atau melalui proses konversi dan mereka umumnya tergabung dalam masjid lokal serta organisasi muslim nasional seperti Korea Muslim Federation (KMF) (Umayyatun 2018, Paradays 2022).

Komunitas Muslim di Korea Selatan juga banyak terdiri dari para imigran dan diaspora yang berasal dari berbagai kawasan Asia. Berdasarkan laporan Korea Muslim Federation (KMF), dari sekitar 130.000–150.000 Muslim di Korea Selatan, sekitar 100.000 di antaranya merupakan pekerja migran dan ekspatriat, terutama dari Bangladesh, Indonesia dan Pakistan (Korea Muslim Federation dalam U.S. Department of State 2019). Temuan serupa juga disampaikan oleh OIC (*Organization Islamic Cooperation*) yang mencatat bahwa mayoritas Muslim di Korea berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara (OIC, 2019). Penelitian akademik menunjukkan pola yang sama, di mana komunitas Muslim di Korea Selatan sebagian besar adalah pekerja migran dari Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, dengan sebagian lainnya berasal dari Timur Tengah seperti Irak, Mesir, dan Arab Saudi (Hee-Soo & Young-Joo, 2012; Al Jazeera, 2017). Dominasi populasi imigran dalam komunitas Muslim ini memperkuat adanya kondisi diskriminasi ganda, karena identitas mereka dipersepsikan melalui dua kategori sekaligus: sebagai warga asing dan sebagai pemeluk agama minoritas.

Mereka umumnya menetap sementara atau panjang untuk studi, pekerjaan atau diplomasi dan sering membentuk jaringan sosial berbasis etnis maupun bahasa yang mendukung aktivitas keagamaan dan sosial mereka (Rachmah dan Jahroni 2022, Srimulyani 2023). Mahasiswa dan profesional muslim juga berperan sebagai penghubung antara komunitas lokal dan global, serta membantu kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Komunitas Muslim di Korea Selatan telah tumbuh dengan dukungan struktur organisasi Korea Muslim Federation (KMF) yang diakui negara. Umayyatun (2018) menyatakan bahwa KMF bukan hanya memperjuangkan hak keagamaan, tetapi juga berupaya mengubah citra Islam dari

citra kekerasan menjadi kedamaian melalui dakwah, pendidikan, media dan penerjemahan literatur Islam ke dalam bahasa Korea (Umayyatun 2018).

Menurut Paradays (2022) Korea Muslim Federation (KMF) membangun jaringan global dengan komunitas muslim di berbagai negara, yang berfungsi untuk memberikan dukungan dan koneksi sosial. Jaringan ini akan berfungsi sebagai modal sosial penting yang memperkuat komunitas muslim minoritas di Korea Selatan, memungkinkan mereka menjaga identitas dan memperluas relasi antar komunitas muslim (Paradays 2022). Organisasi seperti KMF menjadi institusi utama yang menaungi masjid, pendidikan dan kegiatan keagamaan, serta mengoordinasikan hubungan antara komunitas muslim Korea dengan diaspora internasional. Masjid-masjid besar, seperti Seoul Central Mosque, selain menjadi tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat sosial, pendidikan, dan kebudayaan bagi komunitas Muslim minoritas (Putri et al. 2022, Yi & Koo 2025). Dengan demikian, meskipun sebagai kelompok minoritas, komunitas Muslim di Korea Selatan memiliki struktur sosial yang kompleks dan beragam, yang penting untuk dipahami dalam analisis fenomena islamofobia dan kekerasan kultural.

Islam pertama kali masuk ke Korea melalui rute perdagangan pada abad ke-9 Masehi, selama Dinasti Silla. Pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Korea menerapkan kebijakan isolasi dan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menganut Konfusianisme, sehingga hubungan antara Islam dan Korea terputus. Pada era modern, Islam di Korea Selatan berkembang pesat berkat kontribusi tentara Turki dalam Perang Korea pada tahun 1950-an. Para tentara Turki yang beragama Islam banyak membantu sekolah-sekolah di Korea Selatan dan dari sana mereka mengajarkan Islam kepada rakyat Korea (Nurhalisa 2021). Komunitas muslim di

Korea Selatan pertama kali muncul pada tahun 1995 melalui datangnya tentara Turki yang bertugas di Perang Korea. Saat itu, sebagian orang tertarik dengan Islam dan mulai memeluk agama Islam (Rahmat 2018). Namun, pada tahun 1970-an perkembangan Islam barulah mulai terlihat secara signifikan, saat para imigran muslim dari penjuru negeri mulai datang ke Korea Selatan untuk bekerja sekaligus belajar. Saat itu, pemerintah Korea Selatan mulai memberikan bantuan kepada komunitas muslim dengan memberikan izin untuk membangun masjid serta lembaga untuk mempelajari Islam (Minardi 2011).

Salah satu organisasi komunitas muslim terbesar yaitu (KMF) Korean Muslim Federation yang didirikan pada tahun 1967, Korea Muslim Federation (KMF) merupakan organisasi Islam resmi di Korea Selatan yang bertugas untuk mengelola urusan keagamaan dan sosial komunitas muslim di negara tersebut. KMF diakui pemerintah melalui registrasi pada Kementerian Kebudayaan dan Informasi, sehingga memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan mereka membangun masjid, menyelenggarakan pendidikan, dan melakukan dakwah secara terbuka.

Organisasi ini memiliki berbagai divisi, termasuk *Halal Committee* yang menerbitkan sertifikasi halal untuk produk dan restoran, *Haji Committee*, serta lembaga pendidikan seperti madrasah dan pusat kebudayaan Islam (UIN Sunan Kalijaga, 2022). Peran KMF tidak hanya mencakup layanan domestik seperti penyediaan tempat ibadah dan pengajaran agama, tetapi juga hubungan internasional, misalnya melalui pengakuan sertifikasi halal oleh lembaga-lembaga di negara lain (Kemenag RI, 2023). Dengan fungsi-fungsi tersebut, KMF menjadi jembatan penting antara komunitas muslim minoritas dan pemerintah Korea

Selatan, sekaligus membantu pemeliharaan identitas keagamaan, penyediaan makanan halal, serta penguatan pemahaman publik tentang Islam di tengah masyarakat yang mayoritas non muslim (Republika, 2021).

KMF juga memiliki kedudukan berarti dalam mengembangkan komunitas muslim di Korea Selatan. KMF memiliki peran sebagai sebuah perantara antara umat Islam lokal serta global dan menyediakan bantuan untuk aktivitas dakwah serta pembelajaran Islam. KMF juga memberikan upaya mengganti citra Islam di media yang sering kali dipandang negatif menjadi lebih positif lewat berbagai program sosial dan budaya. KMF sukses membangun sebuah jaringan dengan berbagai macam organisasi muslim internasional yang menolong dalam pengembangan komunitas dan memberikan support kepada mereka yang membutuhkan, organisasi ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada warga non muslim tentang ajaran Islam lewat seminar serta kegiatan publik. Komunitas muslim di Korea Selatan menghadapi perkembangan yang positif, akan tetapi mereka mengalami banyak tantangan. Salah satunya adalah stereotip negatif tentang Islam yang sering muncul di media. Masalah ini dapat menimbulkan kesalahpahaman sekaligus diskriminasi terhadap umat Islam di masyarakat (Paradays 2022).

Selain itu, walaupun sudah dilakukannya upaya untuk membangun ikatan yang baik dengan warga lokal, masih susah menjadi perantara perbandingan budaya antara umat Islam serta warga Korea yang sebagian besar warganya non muslim (Paradays 2022). KMF terus memberikan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan meningkatkan diskusi antar agama dan memperkenalkan nilai-nilai Islam yang damai kepada masyarakat secara luas. Komunitas muslim di

Korea Selatan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, mereka juga berkontribusi dalam bidang sosial dan budaya (Paradays 2022). Banyak masjid di Korea Selatan yang aktif dalam aktivitas amal serta sosial, seperti menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan dan menolong para imigran baru untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Korea (Paradays 2022).

Komunitas muslim yang ada di Korea Selatan ini juga mempromosikan budaya Islam melalui festival santapan halal dan acara-acara kebudayaan lainnya yang mengundang partisipan warga lokal. Hal ini dapat membantu untuk memperkenalkan budaya Islam kepada warga non muslim serta menghasilkan banyak hal yang lebih baik antara kedua belah pihak. Komunitas Muslim di Korea Selatan ini merupakan salah satu contoh nyata dari keberagaman agama dalam warga modern. Walaupun mengalami banyak tantangan sebagai kelompok minoritas, mereka memperlihatkan dinamika perkembangan yang positif lewat organisasi seperti Korean Muslim Federation (KMF) dan partisipasi aktif dalam aktivitas sosial serta budaya. Untuk terus membangun jembatan komunikasi antara umat Islam dan warga lokal, maka dapat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih inklusif bagi semua agama untuk menjadi terbuka lebar (Paradays 2022).

Jumlah komunitas Muslim di Korea Selatan selama periode 2017–2022 tidak tercatat secara resmi dalam sensus nasional, sehingga data yang tersedia hanya berupa perkiraan dari berbagai laporan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada pertengahan dekade 2010-an populasi komunitas muslim yang sebagian besar terdiri dari pekerja migran dan pelajar internasional berada di kisaran 150.000 orang (Arab News, 2019). Laporan lain dari Korea Muslim

Federation (KMF) dan media internasional memperkirakan bahwa menjelang tahun 2020 jumlah tersebut meningkat hingga sekitar 200.000 orang, termasuk warga negara Korea yang memeluk Islam serta komunitas muslim asing yang tinggal sementara (The Korea Times 2022, Alestiklal, 2021). Variasi angka ini muncul karena pemerintah Korea Selatan tidak melakukan pendataan agama minoritas secara rinci per tahun, sehingga estimasi sangat bergantung pada catatan organisasi muslim dan survei independen. Meskipun demikian, berbagai sumber sepakat bahwa populasi muslim di Korea Selatan menunjukkan tren pertumbuhan moderat sepanjang 2015–2020, seiring meningkatnya jumlah pekerja migran dan minat sebagian kecil warga lokal terhadap Islam.

Komunitas muslim di Korea Selatan sendiri hampir memiliki pengalaman setiap harinya, salah satunya mereka sering diwarnai oleh banyak rintangan yang disebabkan oleh stigma sosial. Anggota dari komunitas muslim banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai macam bentuk, seperti saat di tempat kerja mereka mendapat perlakuan yang tidak adil akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mencari akomodasi. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat ujaran kebencian dan hal ini menjadi masalah yang serius, beberapa diantara mereka juga melaporkan bahwa mereka mengalami insiden verbal maupun fisik yang ditujukan kepada mereka karena identitas agama. Akibat dari ketidakpastian ini banyak orang yang merasa terasing, akhirnya mereka mengalami kendala untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Korea yang lebih luas (Handayani and Nasrullah 2021).

Akan tetapi meskipun mereka mengalami banyak tantangan, komunitas muslim di Korea Selatan terus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka

dengan masyarakat setempat. Organisasi-organisasi muslim aktif untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya hal ini bertujuan untuk memberikan peningkatan atas pemahaman tentang Islam. Mereka sering membuat program edukasi dan dialog antar budaya untuk meminimalisir stereotip negatif dan menciptakan hubungan positif dengan warga lokal. Banyak kegiatan yang menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan ruang diskusi dan lebih merangkul perbedaan antara kedua kelompok ini, contohnya seperti menyelenggarakan festival makanan halal dan mengadakan seminar tentang nilai-nilai Islam. Media memiliki peran yang krusial untuk membangun persepsi publik terkait Islam (Azizah and Fathoni 2022).

Komunitas muslim di Korea Selatan terus mengalami pertumbuhan, munculnya sentimen islamofobia di Korea Selatan mulai menjadi nyata setelah peristiwa serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat. Sebelum kejadian tersebut, masyarakat Korea Selatan cenderung tidak memberikan perhatian yang signifikan terhadap Islam, dan muslim dipandang sebagai kelompok minoritas yang tidak memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas sosial maupun budaya lokal. Setelah serangan tersebut, persepsi masyarakat terhadap umat Islam mengalami perubahan yang signifikan. Insiden penculikan warga negara Korea oleh kelompok Taliban di Afghanistan pada tahun 2007 juga semakin memperburuk situasi ini. Peristiwa tersebut tidak hanya memperkuat stigma negatif terhadap muslim, tetapi juga mendorong media dan masyarakat untuk mengaitkan Islam dengan kekerasan dan ancaman terhadap keamanan.

Perubahan persepsi ini mencerminkan pengaruh peristiwa global terhadap dinamika sosial lokal, di mana narasi internasional tentang terorisme berkontribusi

pada pembentukan stereotip negatif terhadap komunitas muslim di Korea Selatan (Lee 2011). Perkembangan lebih lanjut yang memperburuk sentimen islamofobia di Korea Selatan terjadi setelah deklarasi kekhalifahan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2014. Insiden-insiden teror yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah, yang secara intensif diliput oleh media Korea, semakin memperkuat stereotip negatif terhadap Islam di kalangan masyarakat. Representasi negatif ini semakin diperkuat oleh cara media menyampaikan berita tentang umat Islam, yang sering kali mengaitkan mereka dengan terorisme tanpa memberikan konteks yang seimbang atau tantangan terhadap narasi yang ada (Koo, 2018).

Sejak tahun 1980 an hingga 2010, jumlah total masyarakat muslim yang ada di Korea Selatan tercatat mencapai sekitar 75.000 jiwa. Peningkatan populasi yang sangat signifikan terjadi dalam rentang waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2015 hingga 2020, total populasi muslim di Korea Selatan mencapai 195.000 jiwa pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 100.000 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 135.000 jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 200.000 jiwa (Paradays, 2022). Selain pertumbuhan pesat populasi muslim di Korea Selatan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut juga mengalami peningkatan signifikan dalam rentang waktu 2016 hingga 2019. Sebanyak 980.000 wisatawan muslim mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2016, mencatatkan peningkatan sebesar 33% dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2017, jumlah wisatawan muslim yang datang menurun menjadi 860.000 orang (Hilwa 2021).

Penurunan ini disebabkan oleh dampak dari kesepakatan Korea Selatan untuk membangun sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) bersama Amerika Serikat. Setelah melalui pemulihan dari masalah tersebut, jumlah wisatawan muslim kembali meningkat pada tahun 2018, dengan total 971.000 pengunjung. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2019, dimana jumlah wisatawan muslim yang berkunjung mencapai 1 juta orang, menjadikannya angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Hilwa, 2021).

Fenomena islamofobia ini juga semakin kompleks terjadi dengan munculnya kekhawatiran bahwa masuknya pekerja migran muslim dapat membawa perubahan mendasar pada struktur sosial dan budaya Korea yang selama ini dikenal sebagai masyarakat homogen (Handayani dan Nasrullah 2021). Kehadiran pekerja migran muslim dalam jumlah yang terus meningkat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan konstruksi, menimbulkan persepsi bahwa identitas budaya dan tatanan sosial Korea mungkin berada dalam tekanan. Kekhawatiran ini tidak terlepas dari anggapan bahwa budaya dan praktik keagamaan muslim, yang dianggap berbeda secara signifikan dari nilai-nilai tradisional Korea, dapat memengaruhi dinamika sosial yang ada (Jeong, 2017).

Korea Selatan sendiri lebih dikenal sebagai negara yang masyarakatnya bersikap relatif homogen dalam hal mengenai etnis dan budaya, Komunitas muslim ini memiliki tujuan untuk menjadi pekerja migran, pelajar internasional, dan warga Korea yang beragama Islam yang pada akhirnya memunculkan tantangan baru dalam dinamika sosial. Pada tahun 2017 hingga 2022, terjadi peningkatan kasus yang signifikan terkait dengan fenomena islamofobia, hal ini

menunjukkan bahwa ada ketidakpahaman dan prasangka negatif yang tersebar di masyarakat (Ji-Hye 2021).

Faktor utama yang menyebabkan munculnya fenomena islamofobia di Korea Selatan ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Islam dan budaya muslim. Sebagian besar masyarakat Korea jarang berinteraksi langsung dengan muslim, oleh karena itu mereka lebih sering menerima informasi dari media atau narasi negatif yang tersebar luas. Berita-berita yang disorot oleh media internasional sebagian besar berkaitan dengan terorisme dan konflik yang berhubungan dengan negara-negara muslim, dan mereka tidak memberikan konteks yang lebih jelas mengenai keberagaman yang ada di dalam komunitas muslim tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat Korea yang berpikir bahwa Islam bersifat keras, ekstremisme, dan menciptakan stigma yang sulit dihilangkan (Wazier 2023).

Fenomena islamofobia ini juga disebabkan oleh bangkitnya nasionalisme dikalangan sebagian masyarakat Korea. Beberapa tahun sebelumnya, ada kecenderungan untuk memprioritaskan identitas nasional dan budaya lokal, berulang kali disertai dengan menolak pengaruh asing (Handayani dan Nasrullah 2021). Dengan ini, adanya komunitas muslim banyak pandangan tentang ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Korea. Salah satunya, penolakan yang dilakukan untuk pembangunan masjid di berbagai daerah, hal ini menggambarkan kecemasan yang terjadi akibat perubahan sosial yang dapat menimbulkan sentimen anti-Muslim. Masyarakat sekitar sering merasa bahwa dengan berdirinya masjid akan menyebabkan masalah sosial baru dan mengubah karakter lingkungan mereka (Wazier 2023).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk memainkan peran penting dalam menciptakan bagaimana cara bersikap kepada komunitas muslim. Walaupun mereka memberikan upaya yang mendukung keberagaman budaya dalam kebijakan halal dan promosi pariwisata berbasis agama, sebagian muslim banyak yang berpikir perlindungan hukum untuk hak-hak mereka sebagai minoritas masih sangat kurang. Contohnya, walaupun adanya undang-undang anti-diskriminasi yang diterapkan secara umum, komunitas muslim tidak dilindungi dari diskriminasi berbasis agama. Hal ini mengakibatkan terciptanya persepsi bahwa pemerintah tidak sungguh untuk mengatasi isu-isu yang dialami oleh komunitas muslim, pada akhirnya rasa ketidakadilan semakin bertambah di sekitar mereka (Burhan 2024).

Dalam hal lain, media bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat mengenai komunitas muslim dan menyoroti kontribusi positif yang mereka berikan kepada masyarakat Korea Selatan. Opini komunitas muslim juga diberikan platform, media memberikan bantuan untuk mengurangi stigma dan membangun pemahaman publik agar memiliki pandangan yang lebih baik kepada umat Islam. Dalam dunia internasional, bukan hanya Korea Selatan yang menghadapi masalah terkait fenomena islamofobia, tetapi banyak negara lain yang mengalami masalah ini. Akan tetapi, setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk menangani masalah ini, tergantung pada kondisi sosial dan politiknya. Di Korea Selatan sendiri, menurut pemerintah penting untuk melakukan cara yang proaktif, hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi masyarakatnya tanpa memandang agama dan etnis. Ini juga merupakan pengembangan kebijakan anti diskriminasi yang lebih efektif dan

support terhadap inisiatif dialog yang terjadi antar agama untuk menambah rasa toleransi di masyarakat (Burhan 2024).

Fenomena islamofobia di Korea Selatan merupakan hasil dari interaksi rumit antara sedikitnya pemahaman tentang Islam, kebangkitan nasionalisme dan keterbatasan perlindungan hukum bagi komunitas muslim. Walaupun masalah ini cukup signifikan, usaha yang dilakukan komunitas muslim untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan juga dengan tugas media yang memberikan informasi akurat, dapat memberikan kontribusi pada pembatasan stigma dan menciptakan hubungan baik antarbudaya. Pemerintah harus membuat pendekatan yang tepat untuk partisipasi aktif masyarakat sipil, dengan harapan bahwa Korea Selatan dapat menjadi contoh yang baik untuk negara lain dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keberagaman agama dan budaya dengan cara yang konstruktif (Wazier 2023). Fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan merupakan sebuah fenomena yang terbilang sulit dan terjadi akibat beberapa faktor seperti politik, sosial dan budaya. Walaupun jumlah umat muslim di Korea Selatan hanya sekitar 200.000 jiwa, atau bisa dikatakan relatif sedikit, banyak yang masih berpandangan negatif terhadap Islam dan umat muslim terutama saat terjadinya interaksi sosial dan globalisasi. Munculnya islamofobia, disebabkan oleh pemahaman masyarakat Korea yang masih kurang terhadap Islam. Saat abad ke-9 Islam datang ke Korea, terjadi hubungan yang pasang surut antara Islam dan masyarakat Korea (Musafak 2024).

Fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan memang berdampak terhadap komunitas muslim, namun pengaruhnya tidak selalu dirasakan secara seragam oleh seluruh populasi yang berjumlah sekitar 200.000 orang. Tingkat

pengalaman diskriminasi dan prasangka bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi geografis, status sosial atau ekonomi serta asal-usul etnis anggota komunitas. Misalnya, seperti kelompok muslim yang tinggal di kota-kota besar seperti Seoul atau Daegu, tempat masjid besar berada atau yang sering bersinggungan dengan publik, media dan kelompok Kristen konservatif, mereka cenderung lebih terekspos terhadap stereotip negatif dan penolakan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah dengan interaksi publik yang lebih rendah (Yuk 2025, Putri et al. 2022). Selain itu, mahasiswa dan pekerja migran dari Asia Tenggara atau Selatan dapat menghadapi bentuk diskriminasi yang berbeda dibanding dengan muslim Korea asli atau diaspora Timur Tengah. Oleh karena itu, dapat ditekankan kembali bahwa fenomena islamofobia ini berdampak secara nyata, akan tetapi proporsinya berbeda-beda di antara satu kelompok atau individu tertentu dari setiap sub-komunitas muslim yang ada di Korea Selatan.

Kebijakan sosial mulai diterapkan pada abad ke-14 oleh kerajaan Korea, yang menyebabkan putusnya hubungan ini, dan mulai terhubung kembali saat setelah terjadinya Perang Korea karena kontribusi tentara Turki. Sangat disayangkan, walaupun terjadi perkembangan yang positif saat beberapa tahun terakhir, Islam masih sering diasosiasikan sebagai teroris dan kekerasan lewat media, apalagi saat terjadinya pasca serangan 11 September 2001 dan kebangkitan ISIS pada tahun 2014. Media dan stereotip negatif sudah memiliki peran penting untuk menciptakan pandangan masyarakat terhadap Islam. Sebagian besar masyarakat Korea sudah memiliki pandangan negatif kepada umat muslim lewat berita, film, dan budaya yang menyoroti tentang kekerasan dan konflik (Minardi 2011). Kondisi seperti ini mengakibatkan ketakutan dan prasangka yang tidak

berdasar, khususnya karena sedikitnya interaksi langsung antara komunitas muslim dan masyarakat.

Tanggapan negatif mereka terhadap produk halal juga menjadi salah satu indikator meningkatnya fenomena islamofobia. Sebagian orang memiliki pandangan akan produk halal sebagai alat untuk memperluas penyebaran terhadap pengaruh Islam di Korea Selatan, yang berakhir pada keraguan terhadap umat muslim yang mengonsumsi makanan halal dan juga timbul stigma negatif. Selain itu, juga banyak terjadi kejadian yang tentu dapat memperburuk keadaan. Penolakan yang ditujukan kepada pencari suaka muslim pada tahun 2018 yang berasal dari Yaman, memperlihatkan seperti apa kecemasan akan imigrasi bisa menyebabkan terjadinya respon negatif dari masyarakat. Salah satu survei yang dilakukan oleh World Values Survey, tercatat sebanyak 44.2% orang Korea Selatan sulit menerima tetangga asing di lingkungan mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana tingginya hegemonitas masyarakat Korea Selatan dan juga menggambarkan tingkat xenofobia yang tinggi (Ji-Hye 2021).

Berdasarkan data dan studi kasus yang tersedia, terdapat bukti nyata bahwa fenomena islamofobia yang terjadi di Korea Selatan dan berdampak pada sebagian komunitas Muslim pada 2017 hingga 2022 dapat dilihat melalui beberapa kasus seperti kasus penolakan masjid, kasus diskriminasi terhadap pekerja migran muslim dan retorika masyarakat terkait dengan wacana anti komunitas muslim. Namun, karena keterbatasan data kuantitatif tahunan yang sistematis, sulit untuk menyatakan bahwa semua 200.000 muslim Korea merasakan dampak yang sama atau intensitas yang sama di setiap tahun. Sebenarnya tidak ada laporan resmi tahunan yang merinci jumlah terkait

peningkatan fenomena islamofobia, baik itu seperti penganiayaan fisik dan kejahatan kebencian dari tahun 2017–2022 yang mudah diakses dalam literatur akademik internasional. Sebagian data berasal dari studi kualitatif seperti wawancara, survei lokal dan laporan kasus, sehingga hal ini sulit untuk menggeneralisasi ke seluruh komunitas muslim. Laporan media seperti artikel Korea Times tentang Daegu menunjukkan insiden diskriminatif, tetapi tidak selalu menyediakan statistik data numerik tahunan yang lengkap. Penelitian akademik juga biasanya seringkali fokus pada kasus tertentu seperti pembangunan masjid dan para pekerja migran. Sehingga tidak mengumpulkan data skala nasional secara sistematis dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagian individu sudah berinteraksi secara positif dengan masyarakat Korea dan toleransi mulai ada dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perbedaan yang sangat terlihat antara apa yang pernah mereka alami secara langsung maupun persepsi yang tersebar di dunia maya, hal ini membuktikan bahwa terjadi pemahaman yang signifikan. Sebagian besar umat muslim mengatakan bahwa walaupun mereka tidak menghadapi diskriminasi secara langsung, mereka masih tetap merasakan terjadinya stigma yang kuat di publik maupun secara online. Penyebab awal mula kemunculan fenomena islamofobia di Korea Selatan adalah hasil dari interaksi kompleks dari berbagai faktor seperti sosial, politik dan historis. Dan juga tidak terlepas dari sedikitnya pemahaman tentang Islam, pengaruh media negatif serta kebangkitan kelompok anti ajaran Islam yang tentunya memberikan kontribusi meningkatnya sentimen negatif terhadap umat muslim (Minardi 2011).

2.2 Sikap Pemerintah Korea Selatan Merespons Fenomena Islamofobia

Pemerintah Korea Selatan merespon fenomena islamofobia yang terjadi di sana dengan mencerminkan usaha untuk menjadikan citra mereka lebih inklusif dan ramah ke seluruh agama, termasuk kepada umat muslim. Pemerintah Korea Selatan sendiri secara konstitusional menjamin kebebasan beragama, termasuk bagi komunitas muslim, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Konstitusi Republik Korea (National Law Information Center, 2023). Jaminan ini menjadi dasar pengakuan hukum terhadap organisasi seperti Korea Muslim Federation (KMF) yang sejak 1967 diakui secara resmi dan berhak mengelola masjid, pendidikan agama serta sertifikasi halal.

Dalam praktiknya, pemerintah Korea Selatan cenderung menekankan prinsip non intervensi dan perlindungan hak asasi manusia, sementara lembaga seperti *National Human Rights Commission of Korea* (NHRCK) yang kerap mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah lokal menghormati hak minoritas beragama, termasuk muslim, seperti halnya ketika terjadi sengketa pembangunan masjid atau ruang ibadah (Korea Human Rights Commission 2022). Seperti dalam kasus penolakan pembangunan masjid di kota Daegu pada tahun 2021, komisi tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintah daerah yang menghentikan proyek karena tekanan warga bertentangan dengan hak kebebasan beragama (The Korea Times 2021). Meski begitu, berbagai laporan menilai respons pemerintah masih bersifat simbolik, karena upaya edukasi publik tentang Islam dan kebijakan anti-diskriminasi belum sepenuhnya efektif, sehingga sentimen terkait dengan fenomena islamofobia di tingkat masyarakat tetap muncul, terutama dalam isu seperti izin masjid dan penyediaan fasilitas halal (Korea Exposé, 2022). Dengan

demikian, sikap pemerintah Korea Selatan dapat dikatakan menyeimbangkan antara penegakan konstitusi dan tekanan sosial, akan tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar.

Sikap dan tindakan respons dari pemerintah Korea Selatan tentunya telah mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan ini, meskipun tidak selalu berhasil. Fenomena islamofobia di Korea Selatan telah menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya populasi muslim akibat migrasi pekerja dari negara-negara berpenduduk muslim (Jaehyon 2019). Fenomena ini semakin diperburuk oleh tindakan diskriminatif yang terjadi, seperti penolakan pembangunan masjid di Daegu, di mana masyarakat setempat melakukan protes dengan cara yang provokatif, termasuk mengadakan pesta barbekyu daging babi di lokasi pembangunan masjid. Tindakan ini mencerminkan adanya sentimen anti-muslim yang kuat di kalangan sebagian masyarakat (Azizah and Fathoni 2022). Pemerintah Korea Selatan telah mengambil beberapa sikap dan langkah untuk mendukung pembangunan fasilitas bagi komunitas muslim, termasuk masjid dan pusat budaya Islam. Namun, respons ini sering kali terhambat oleh penolakan dari masyarakat lokal. Sehingga implementasi dari rekomendasi tersebut sering kali tidak konsisten, masih banyak kasus diskriminasi yang terjadi tanpa sanksi yang jelas terhadap pelakunya. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan dialog antaragama dan edukasi tentang keberagaman budaya (Burhan 2024).

Beberapa inisiatif juga telah diluncurkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memperkenalkan masyarakat Korea kepada budaya dan praktik Islam melalui program-program edukasi dan seminar. Namun, efektivitas

program-program ini sering kali terbatas karena kurangnya partisipasi dari masyarakat luas dan ketidakpahaman yang mendalam tentang isu-isu terkait Islam. Ketika protes anti-Islam terjadi, seperti penolakan pembangunan masjid atau aksi unjuk rasa oleh kelompok konservatif Kristen, pemerintah cenderung bersikap defensif. Tindakan represif terhadap protes tersebut sering kali tidak terlihat, sementara suara komunitas Muslim seringkali terabaikan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas sosial daripada perlindungan hak asasi manusia bagi minoritas (Jaehyon 2019).

Kebijakan imigrasi Korea Selatan juga menjadi sorotan dalam konteks islamofobia ini. Meskipun ada upaya untuk menarik pekerja migran dari negara-negara Muslim, banyak dari mereka menghadapi tantangan dalam mendapatkan status hukum yang aman dan perlindungan hak-hak mereka. Penolakan terhadap pengungsi Muslim dari Yaman pada tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi stigma negatif terhadap komunitas muslim. Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah stigma sosial yang melekat pada komunitas muslim. Banyak warga Korea Selatan masih terpengaruh oleh stereotip negatif tentang Islam yang dipicu oleh media dan kelompok ekstremis. Ini membuat upaya pemerintah untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam menjadi sulit (Jaehyon 2019).

Meskipun ada perhatian internasional terhadap isu-isu hak asasi manusia di Korea Selatan, dukungan konkret dari organisasi internasional seringkali minim. Hal ini membuat pemerintah merasa kurang terdorong untuk mengambil tindakan tegas dalam melawan diskriminasi terhadap komunitas muslim. Sikap pemerintah Korea Selatan dalam merespons fenomena islamofobia menunjukkan

adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi komunitas muslim, tetapi tantangan-tantangan signifikan masih ada. Meskipun ada dukungan dan inisiatif yang dilakukan seperti dialog antaragama, implementasinya seringkali terhambat oleh stigma sosial, politik konservatif dan kurangnya dukungan internasional (Jaehyon 2019). Pemerintah Korea Selatan sendiri juga telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan multikulturalisme dan mengurangi diskriminasi, termasuk pengesahan Undang-Undang Pemerataan Peluang dan Perlindungan dari Diskriminasi tahun 2016. Namun, kebijakan anti-diskriminasi secara menyeluruh masih belum sepenuhnya diterapkan dan public consensus atau dukungan masyarakat masih menjadi hambatan besar untuk perubahan yang lebih signifikan.

BAB 3

**BENTUK-BENTUK KEKERASAN KULTURAL YANG DILAKUKAN
OLEH MASYARAKAT KOREA SELATAN TERHADAP KOMUNITAS
MUSLIM**

Berbagai bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh komunitas muslim di Korea Selatan tidak terjadi begitu saja. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim. Penjelasan ini akan memberikan pemahaman bahwasanya kekerasan kultural terhadap komunitas muslim di Korea Selatan sebagai siklus yang tidak akan ada habisnya. Seperti yang telah dijelaskan Galtung dalam jurnalnya, bahwa kekerasan jenis kultural ini seringkali tidak disadari oleh pihak yang melakukan ataupun pihak yang menjadi korban. Dapat dilihat bahwa instrumen dari kekerasan kultural yakni aspek agama, aspek ideologi, aspek bahasa dan aspek seni menjadi pendorong terjadinya kekerasan yang dihadapi oleh komunitas muslim di Korea Selatan.

3.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama

Johan Galtung menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul *Cultural Violence* bahwa agama itu merupakan salah satu bentuk aspek dalam kekerasan kultural. Dalam hal ini merujuk pada bagaimana agama itu dapat menjadi alat pembenaran dan legitimasi terhadap tindakan kekerasan dengan menempatkan hal-hal yang benar atau salah, dimana hal-hal yang benar ini berasal dari tuhan sedangkan hal-hal yang salah itu berasal dari setan. Kemudian, jika ajaran agama

itu diterapkan atau diimplementasikan ke dalam suatu hal yang salah maka dari penjelasan Galtung dapat dipahami bahwasannya hal tersebut merupakan adanya bentuk kekerasan kultural (Galtung 1990). Kekerasan kultural pada aspek agama terjadi ketika ajaran atau simbol keagamaan mayoritas dipakai, secara sadar maupun tidak, untuk melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok lain.

Dalam konsep kekerasan kultural Johan Galtung, masyarakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *The Chosen* dan *The Unchosen*. *The Chosen* merupakan kelompok yang dianggap superior, dominan atau sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku, sehingga berhak atas pengakuan, perlindungan, dan legitimasi dalam struktur sosial. Di Korea Selatan, kelompok mayoritas non muslim, khususnya Kristen konservatif, dapat dikategorikan sebagai *The Chosen* karena memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan norma dan nilai masyarakat (Yuk 2025). Sebaliknya, *The Unchosen* adalah kelompok yang dipandang berbeda, inferior, atau menyimpang dari nilai dominan, sehingga rentan mengalami diskriminasi, marginalisasi atau bahkan kekerasan simbolik. Komunitas muslim, baik lokal maupun migran, termasuk dalam kategori ini karena dianggap berbeda secara agama, budaya dan praktik sosial sehari-hari. Posisi ini diperkuat melalui berbagai mekanisme kekerasan kultural, seperti retorika negatif dalam media, penolakan pembangunan masjid dan simbolisme budaya yang merendahkan Islam.

Secara demografis, agama terbesar di Korea Selatan adalah Kristen (terdiri dari Protestan dan Katolik), disusul oleh Buddha, sementara sebagian besar masyarakat Korea Selatan mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama.

Berdasarkan data dari *Pew Research Center dan Korean Statistical Information Service* (KOSIS), sekitar 27–28% penduduk Korea Selatan menganut Kristen (sekitar 19% Protestan dan 8% Katolik), 15–16% beragama Buddha, dan lebih dari 55% tidak berafiliasi pada agama tertentu. Sementara itu, penganut Islam di Korea Selatan sangat kecil, hanya sekitar 0,3% dari total populasi, atau sekitar 150.000–200.000 orang, termasuk warga negara asing (Pew Research Center 2023, KOSIS 2022).

Adapun dalam konteks pelaku terkait dengan adanya islamofobia, sebagian besar berasal dari kelompok Kristen konservatif terutama dari kalangan Evangelikal Protestan. Mereka kerap menjadi aktor utama dalam protes terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain seperti pembangunan masjid yang terjadi di Daegu dan penyebaran narasi bahwa Islam merupakan ancaman terhadap budaya serta moral bangsa Korea. Aksi-aksi tersebut sering kali dimotivasi oleh tafsir keagamaan yang menekankan supremasi nilai-nilai Kristen serta ketakutan terhadap pluralisme agama (Kim, Religions, 2021). Sementara itu, masyarakat tidak beragama atau penganut agama lain (seperti Buddha) umumnya tidak secara aktif terlibat dalam tindakan islamofobia, meskipun bias budaya yang lebih luas juga turut berperan dalam memperkuat stereotip terhadap umat muslim.

Menurut berbagai penelitian, persepsi negatif terhadap Islam di Korea Selatan banyak dipengaruhi oleh dominasi Kristen konservatif dalam masyarakat dan ruang publik. Cho (2022) menunjukkan bahwa wacana media dan aktor politik konservatif sering membingkai Islam sebagai ancaman moral dan budaya. Kim (2023) menegaskan bahwa nasionalisme etnis Korea, yang kerap ditopang

oleh nilai-nilai Kristen konservatif, mendorong kecenderungan masyarakat untuk menolak pengaruh asing termasuk Islam. Studi kasus penolakan pembangunan masjid yang diteliti oleh Putri et al. (2022) memperlihatkan bagaimana kelompok warga menggunakan retorika moral, kekhawatiran keamanan, dan identitas budaya untuk menolak kehadiran komunitas Muslim. Dalam sejumlah laporan media, gerakan dan tokoh Kristen konservatif seperti National Sovereign Action juga terlibat dalam aksi protes anti-Islam, termasuk penggunaan simbol-simbol provokatif seperti kepala babi untuk menolak masjid (Yuk 2025). Temuan-temuan ini konsisten menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Korea yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen konservatif cenderung melihat Islam sebagai agama asing sekaligus ancaman moral bagi identitas nasional yang homogen.

Beberapa kelompok protestan konservatif di Korea Selatan juga memproduksi narasi yang menampilkan bahwa Islam sebagai ancaman sosial dan budaya. Mereka menggunakan wacana Islamisasi serta memanipulasi retorika hak asasi manusia untuk mendiskualifikasi muslim (Yuk 2025). Pandangan eksklusif ini juga terlihat dalam berbagai wacana publik, sebagian gereja konservatif menolak pembangunan masjid, sementara media arus utama sejak peristiwa 11 September 2001 kerap mengaitkan Islam dengan terorisme, menumbuhkan stereotip bahwa muslim identik dengan kekerasan. Praktik tersebut memperkuat normalisasi penolakan terhadap kebutuhan ibadah komunitas muslim, misalnya seperti dalam kasus penolakan pembangunan masjid Daegu pada tahun 2021 yang dibenarkan atas dalih ketidakcocokan budaya.

Selain kasus Daegu, laporan tahunan U.S. *Department of State* (2020) turut mencatat adanya diskriminasi terhadap pekerja muslim, terutama di sektor industri dan komunitas migran. Insiden yang menimpa kelompok warga Uzbekistan yang mendapat perlakuan diskriminatif saat kegiatan sosial menjadi bukti bahwa stigmatisasi terhadap Islam tidak terbatas pada ruang publik, tetapi juga telah meresap ke dalam perilaku sosial dan institusional. Selain itu, fasilitas publik yang juga jarang mengakomodasi kewajiban shalat atau puasa Ramadhan, dan perempuan berhijab kerap mendapat komentar bahwa busana mereka tidak sesuai norma lokal. Seluruh pola ini mencerminkan kekerasan kultural agama, keyakinan mayoritas tentang harmoni sosial dipakai sebagai pembenaran halus bagi marginalisasi muslim, sehingga diskriminasi tampak wajar meski tidak melibatkan kekerasan fisik (Cho 2022, Lee & Kim 2023).

Kelompok Kristen konservatif di Korea Selatan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi negatif terhadap komunitas muslim melalui interpretasi ajaran dan praktik keagamaannya. Beberapa kelompok Protestan konservatif menekankan ajaran dualisme beriman vs kafir, di mana umat Kristen diposisikan sebagai pihak yang benar, sedangkan agama lain, termasuk Islam, dianggap sesat atau berpotensi mengancam moral dan identitas bangsa (Yuk 2025). Kemudian juga ada prinsip eksklusivisme keselamatan (*salvation exclusivism*) yang menyatakan bahwa hanya orang Kristen yang memperoleh keselamatan juga sering digunakan untuk menjustifikasi penolakan interaksi atau marginalisasi sosial terhadap kelompok minoritas seperti muslim (Ghazi, Fathil dan Deliana 2023).

Selain itu, retorika nasionalisme Kristen mengaitkan identitas Kristen dengan identitas nasional Korea, sehingga agama lain, termasuk Islam, dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan budaya Korea, yang memunculkan sikap menolak pembangunan masjid atau kegiatan sosial Muslim (Yuk 2025). Narasi yang mengasosiasikan Islam dengan kekerasan atau ekstremisme, meskipun tidak berbasis bukti langsung, juga digunakan untuk membenarkan sikap diskriminatif dalam ranah sosial dan budaya (Putri et al. 2022). Dengan demikian, interpretasi ajaran Kristen konservatif yang bersifat eksklusif dan nasionalis menciptakan legitimasi moral dan kultural untuk diskriminasi terhadap komunitas Muslim, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan kultural (*cultural violence*), di mana norma dan simbol keagamaan digunakan untuk menjustifikasi marginalisasi kelompok minoritas.

Fenomena islamofobia di Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari peran sebagian kelompok Kristen konservatif yang memegang doktrin evangelisasi secara ketat. Dalam tradisi evangelikal, pewartaan kebenaran Kristen sering dipahami sebagai mandat religius untuk melindungi masyarakat dari ajaran yang dianggap menyesatkan atau berbahaya secara moral (Cho 2022). Cho (2022) menunjukkan bahwa narasi evangelikal ini kemudian digunakan untuk membingkai Islam sebagai agama asing yang salah (*false teaching*) sekaligus sebagai ancaman moral bagi masyarakat Korea yang mayoritas Kristen. Temuan tersebut diperkuat oleh studi Putri et al. (2022), yang mengungkap bahwa retorika moral seperti keselamatan jiwa dan bahaya doktrin Islam muncul kuat dalam berbagai aksi penolakan pembangunan masjid (Putri et al. 2022). Selain itu, Yuk (2025) mencatat bahwa beberapa kelompok Kristen konservatif dan aktivis

nasionalis menggunakan bahasa teologis dan nasionalistik secara bersamaan untuk menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap kemurnian moral dan identitas nasional (Yuk 2025).

Rachmah dan Jahroni (2022) juga menegaskan bahwa wacana keagamaan konservatif berkontribusi besar dalam memproduksi stigma negatif terhadap umat Muslim di ruang publik. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa doktrin evangelisasi yang berkembang dalam sebagian kelompok Kristen konservatif memainkan peran signifikan dalam melanggengkan persepsi bahwa Islam adalah agama asing sekaligus ancaman moral di Korea Selatan (Rachmah dan Jahroni 2022). Retorika ini kemudian digunakan untuk menentang pembangunan masjid atau kegiatan komunitas Muslim di ruang publik dengan dalih mempertahankan kebenaran agama. Selain itu, narasi nasionalisme religius yang menekankan identitas moral bangsa Korea sebagai Kristen, menempatkan komunitas Muslim sebagai *The Unchosen* yang berbeda dari norma mayoritas, sehingga diskriminasi terhadap mereka dapat dianggap sah secara sosial dan kultural (Yuk 2025).

Korea Selatan sendiri merupakan negara maju dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 51 jiwa dengan berbagai macam agama, baik itu agama tradisional seperti Shamanisme (Perdukunan), Buddhisme, Taoisme dan Konfusianisme atau agama modern seperti Kristen, Katolik, Protestan dan yang lainnya (Sang Taek Lee 1946). Masyarakat Korea Selatan lebih dominan menganut agama Kristen konservatif sehingga diskriminasi dan kekerasan yang terjadi berbasis agama didorong oleh kepercayaan masyarakat Korea Selatan terhadap ajaran dalam agama tersebut. Agama sendiri dapat diartikan sebagai identitas bagi masyarakat Korea Selatan. Dalam kasus kekerasan kultural terhadap

komunitas muslim di Korea Selatan, kekerasan kultural dalam aspek agama terdapat pada adanya ajaran agama kristen konservatif yang masih mengakar dan menjadi budaya hingga saat ini (Chung 2015).

Dalam hal ini, jika melihat ke dalam kasus kekerasan kultural terhadap komunitas muslim di Korea Selatan yang berkaitan dengan aspek agama. Korea Selatan sebagai negara maju yang sudah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek salah satunya dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Korea Selatan sendiri, namun ajaran agama Kristen konservatif masih tetap mengakar dan menimbulkan adanya perbedaan budaya etika, moral dan keharmonisan sosial serta ritual keagamaan atau doktrin keimanan yang kaku, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di Korea Selatan, sehingga dari hal inilah yang membuat posisi atau peran komunitas muslim menjadi tersubordinasi. Komunitas Kristen konservatif juga sering ikut serta dalam pelaksanaan kampanye anti-Islam, merayakan potensi Islamifikasi yang sudah dianggap sebagai sebuah ancaman kepada nilai-nilai tradisional Korea (Minardi 2011). Perlakuan yang dihadapi komunitas muslim di Korea Selatan merupakan akibat dari adanya ajaran agama Kristen konservatif yang masih dilanggengkan karena nilai-nilai dalam ajaran ini mengatur masyarakat untuk melakukan kegiatan menghormati serta menjaga sistem moralitas nasional yang ideal (Chung 2015).

Di Korea Selatan sendiri, sebenarnya kekerasan kultural yang dialami komunitas muslim kerap terjadi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, populasi komunitas muslim yang sangat kecil hanya sekitar 0,3 persen penduduk, sehingga

secara sosial masyarakat Kristen konservatif mudah untuk mensubordinasikan kelompok minoritas (Washington DC, Pew Research Center 2017). Kedua, narasi global pasca 9/11 yang sering mengaitkan Islam dengan terorisme ikut mempengaruhi persepsi masyarakat Korea Selatan, bunyi dari narasi-narasi yang sering mewakili bunyi wacana global pasca 9/11 seperti *“Islam is a religion that breeds extremism, “Muslims are potential terrorists, “The war on terror is a war against radical Islam”*. Dari narasi-narasi inilah yang kemudian membentuk bias kultural dan sosial terhadap komunitas muslim di Korea Selatan, memperkuat prasangka dan mempersulit upaya integrasi mereka di masyarakat serta menambah prasangka terhadap kelompok komunitas muslim dibanding kelompok minoritas lain (Sang Yong Han 2022). Ketiga, praktik keagamaan yang terlihat jelas seperti penggunaan jilbab, kebutuhan ruang sholat dan permintaan tempat wisata makanan halal, membuat menonjol di masyarakat yang relatif homogen (Ju-Hee Lee 2022). Terakhir, pengaruh mendalam Kekristenan dalam norma sosial menimbulkan ekspektasi keseragaman budaya dan religius, kelompok yang berbeda sering dianggap mengganggu harmoni (Jae-Woong Park 2023). Karena gabungan faktor inilah komunitas muslim lebih sering menjadi sorotan kasus diskriminasi, meskipun kelompok kepercayaan kecil lain pun sesekali mengalami tekanan serupa namun tidak sebesar atau seterpantau yang dialami muslim. Berdasarkan penjelasan Galtung kekerasan kultural dapat mengesahkan terjadinya kekerasan langsung dikarenakan adanya doktrin agama yang diterapkan dalam hal yang salah, maka nilai-nilai ajaran agama kristen yang terikat dengan ideologi konfusianisme yang ada di Korea Selatan menjadi bagian dari adanya kekerasan kultural dalam aspek agama.

Kekerasan kultural dalam aspek agama di Korea Selatan juga muncul bukan hanya lewat tindakan fisik, tetapi juga dalam bentuk diskriminasi norma, simbolik serta kebijakan yang menekan kelompok agama minoritas, seperti komunitas muslim. Kekerasan struktural dan kekerasan langsung dapat melegitimasi terjadinya kekerasan kultural, karena keduanya membentuk kondisi sosial dan pola pikir yang menormalisasi ketidakadilan serta menanamkan nilai-nilai yang membenarkan praktik kekerasan dalam kehidupan budaya masyarakat. Salah satu contoh yang paling konkret adalah penolakan pembangunan masjid di Daegu. Proyek pembangunan Masjid Darul Emman Kyungpook Islamic Center di Buk-Distrik Daegu, yang mendapat izin awal pada September 2020 ditentang warga sekitar dengan berbagai keluhan termasuk suara ibadah, bau makanan Islam, serta kekhawatiran lalu lintas dan gangguan kebersihan hingga pemerintah daerah mengeluarkan perintah administratif untuk menghentikan konstruksi pada Februari 2021 (Korea Times 2025). Komisi Ham Nasional Korea menyatakan bahwa keputusan penghentian tersebut didasarkan pada prasangka dan diskriminasi terhadap muslim (Korea Times 2025). Selain itu, masyarakat bahkan menggunakan simbol-provokatif seperti memasang spanduk bermuatan ujaran kebencian yang menyebut Islam sebagai agama yang jahat, dan memasang kepala babi mati di lokasi masjid sebagai bentuk protes terhadap pembangunan tersebut (Korea Times 2025).

Dalam konteks tokoh agama di Korea Selatan, sejumlah pemuka dan tokoh kelompok agama Kristen konservatif diketahui turut menyebarkan wacana yang menyiratkan Islamofobia. Salah satu figur yang menonjol adalah Pastor Joseph Joo, pemimpin kelompok *National Sovereign Action*, yang terlibat aktif dalam

protes menolak pembangunan masjid di Daegu. Pastor Joseph Joo tampil bukan sebagai representasi institusi gereja tertentu, melainkan sebagai pemimpin NSA yang aktif mengorganisir aksi protes (Cho 2022). Dalam wawancara dengan media lokal, Joo menegaskan bahwa penolakan mereka tidak dilandasi kebencian terhadap Islam, tetapi dikemas sebagai upaya melawan imperialisme budaya (Cho 2022). Namun, penggunaan istilah tersebut pada praktiknya tetap menjadi strategi wacana yang membingkai keberadaan komunitas Muslim dan pembangunan masjid sebagai ancaman terhadap homogenitas budaya Korea (Cho 2022). Dengan demikian, meskipun diklaim bukan berbasis agama, retorika dari kata imperialisme budaya yang digunakan Joo dan kelompoknya tetap mereproduksi stereotip negatif tentang Islam dan memperkuat sentimen islamofobia di masyarakat (Yuk 2025).

Selain itu, berbagai kelompok evangelikal kristen konservatif di Korea Selatan juga memainkan peran besar dalam menyebarkan sentimen anti-Islam, misalnya dengan mengorganisir *pork parties* di dekat lokasi pembangunan masjid serta memasang spanduk yang menuduh Islam sebagai agama kekerasan. Aksi tersebut bukan hanya merupakan penolakan simbolik terhadap praktik keagamaan muslim, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan kultural yang menormalisasi stigma bahwa Islam adalah ancaman bagi masyarakat Korea (The Korea Herald, 2023. Anadolu Agency, 2022).

Wacana keagamaan yang digunakan sebagian kelompok Kristen konservatif di Korea Selatan dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan kultural dalam kerangka Galtung (1990), yaitu ketika nilai, simbol atau tafsir agama

digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok lain. Dalam konteks penolakan komunitas Muslim, retorika seperti ancaman moral, imperialisme budaya atau klaim bahwa Islam tidak sesuai dengan identitas Korea menjadi dasar legitimasi kultural yang memperkuat eksklusi sosial (Cho 2022, Yuk 2025). Kasus penolakan pembangunan masjid di Daegu menunjukkan bagaimana wacana keagamaan tersebut beroperasi, aktor-aktor seperti Pastor Joseph Joo dan kelompok National Sovereign Action menggunakan bahasa teologis untuk menolak kehadiran Muslim, sementara warga menggunakan simbol-simbol provokatif dalam aksi protes (Putri et al. 2022). Bukti-bukti ini memperlihatkan bahwa wacana keagamaan tidak hanya membentuk stereotip negatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembenaran yang menormalisasi tindakan diskriminatif secara sosial dan struktural terhadap komunitas Muslim di Korea Selatan.

3.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi

Pada poin ini kekerasan kultural dalam aspek ideologi Johan Galtung merujuk pada sistem pemikiran, doktrin atau keyakinan yang mendukung dan membenarkan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Menurut Galtung ideologi itu dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pandangan atau persepsi dari manusia itu sendiri, apabila dalam sebuah negara itu terdapat ideologi yang dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama dari negara tersebut (Galtung 1990). Galtung juga menjelaskan dalam tulisannya apabila mengharapkan penerusan agama dalam bentuk ideologi, politik dan Tuhan adalah sebuah negara yang dapat

menunjukkan beberapa karakter yang sama. Negara-bangsa itu sendiri terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan bahkan budaya yang sangat beragam (Galtung 1990). Dalam hal ini seperti yang dikatakan Galtung bahwa negara sebagai perpanjangan atau penerus tuhan yang memiliki kebijakan untuk mengontrol berdasarkan otoritas negara dengan mengatasnamakan bangsa (Galtung 1990).

Kekerasan kultural pada aspek ideologi muncul ketika gagasan atau doktrin dominan dijadikan landasan pembenaran bagi praktik yang menyingkirkan kelompok tertentu. Di Korea Selatan, identitas nasional yang kuat dibangun atas dasar *danil minjok* yaitu keyakinan bahwa bangsa Korea adalah satu etnis, bersatu dalam bahasa, budaya dan sejarah yang sering kali membuat masyarakat non etnis atau imigran dianggap sebagai asing permanen dalam masyarakat. Dan juga adanya kebijakan multikultural yang mulai diperkenalkan dalam dekade-terakhir untuk merespons kebutuhan tenaga kerja asing dan pernikahan internasional, tetapi diskursus publik masih kerap didominasi oleh kekhawatiran bahwa budaya asing akan menggeser nilai atau keharmonisan budaya Korea (Lee 1993, Shin 2006). Bagi komunitas muslim yang terdiri dari mahasiswa internasional, pekerja migran dan sedikit warga Korea yang muallaf dampaknya nyata, mereka sering menghadapi ketidakpahaman, stereotip dan diskriminasi berbasis agama dan etnis. Meski pengadilan dan lembaga hak asasi manusia dalam beberapa kasus memutuskan mendukung komunitas muslim dan membatalkan penghalangan administratif, konflik sosial tetap saja masih berlangsung, hal ini kemudian menunjukkan bahwa etnik nasionalisme dan anti-multikulturalisme bukan hanya masalah kebijakan, tetapi juga persoalan budaya, persepsi dan ketakutan terhadap perubahan dalam komposisi sosial dan identitas publik (Seol dan Skrentny 2009).

Masyarakat Korea Selatan juga dikenal sebagai salah satu masyarakat yang sangat homogen secara etnis, budaya, dan linguistik. Konsep homogenitas ini berakar dari keyakinan kuat tentang kemurnian darah dan garis keturunan bangsa Korea yang dianggap satu ras dan kelompok etnik yang sama. Ideologi ini mulai menguat sejak masa penjajahan Jepang, ketika kaum intelektual Korea mulai menegaskan identitas etnik mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap asimilasi budaya Jepang (Wazier 2023).

Narasi media dan politik yang juga menonjolkan ancaman pekerja migran atau imigran ilegal turut memperkuat anggapan bahwa pendatang muslim berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Kebijakan imigrasi yang ketat, termasuk persyaratan visa dan pembatasan tempat ibadah, kerap dibenarkan sebagai upaya menjaga keamanan nasional dan kemurnian budaya, padahal secara tidak langsung membatasi praktik keagamaan muslim (Lie 2014). Selain itu, wacana pembangunan negara modern yang berorientasi pada nilai-nilai sekuler Barat mendorong anggapan bahwa tradisi Islam bertentangan dengan modernitas Korea (Kim 2018). Seluruh konstruksi ideologis ini menormalisasi perlakuan diskriminatif seperti misalnya penolakan izin masjid atau minimnya fasilitas halal karena dipandang sebagai langkah rasional demi mempertahankan identitas bangsa, meski sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan kultural secara ideologis (Cho 2022, Kim 2023).

Terlepas dari pengaruh media Barat, Jamass mengaitkan citra negatif orang Korea tentang Islam dengan etno-nasionalisme, yang menumbuhkan ke-Korea-an yang homogen berdasarkan apa yang disebut darah murni. Etno-nasionalisme berfungsi sebagai ideologi penting untuk menyatukan orang

Korea setelah mereka merdeka dari Jepang, dan pendidikan publik telah menanamkan gagasan ini ke dalam masyarakat Korea. Dengan menggunakan nada introspektif, Jang menunjukkan bahwa meskipun etno-nasionalisme berfungsi sebagai mekanisme positif untuk kohesi dan pembangunan nasional, hal itu menjadi ancaman bagi toleransi dan penerimaan Korea terhadap "keberbedaan" orang asing (Jang, 2008: 105). Namun, dengan munculnya globalisasi, imigrasi dan emigrasi meningkat, dan etno-nasionalisme Korea mulai ditantang. Dimulai pada paruh kedua tahun 1990-an, perdebatan ilmiah terjadi pada mitos darah murni, dan kebijakan multikulturalisme pemerintah berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja asing.

Jika melihat situasi kekerasan yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim, dapat dikatakan bahwa masyarakat Korea Selatan sebagai simbol negara yang masyarakatnya masih kental akan budaya nasionalisme etnik, sehingga menjadikan negara ini sebagai negara yang dapat dikatakan sangat mendiskriminasi etnis lain. Pemerintah Korea Selatan sendiri secara umum tidak melakukan kontrol ketat terhadap hak berideologi masyarakat seperti yang terjadi di Korea Utara, karena Korea Selatan sendiri merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Masyarakat Korea Selatan sendiri juga bebas dalam hak untuk memilih, berekspresi, berorganisasi dan berpartisipasi secara luas tanpa pembatasan ideologis yang represif. Namun, hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan kultural dalam aspek ideologi karena pemerintah Korea Selatan tetap mengawasi aktivitas tertentu yang dianggap mengancam keamanan negara, seperti

aktivitas kelompok komunitas muslim yang mana masyarakat Korea Selatan menganggap mereka berideologi ekstrem.

Selain itu masyarakat di Korea Selatan juga memiliki sikap anti-multikulturalisme terhadap komunitas muslim yang muncul dalam wacana sosial serta konflik-konflik nyata, terutama ditandai oleh penolakan pembangunan tempat ibadah dan berbagai bentuk diskriminasi budaya. Penolakan ini tidak hanya sebatas protes verbal, masyarakat lokal melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan langsung dan struktural melalui budaya dan agama, seperti meninggalkan kepala babi di dekat lokasi pembangunan (babi dianggap najis dalam Islam), memasak daging babi di ruang terbuka, memasang spanduk dengan pernyataan islamofobia seperti spanduk yang bertuliskan bahwa Islam adalah agama yang membunuh orang serta menggabungkan komunitas muslim dengan teroris dan menolak ringkasan hak beribadah yang pada akhirnya telah disahkan secara pengadilan (Koreaboo). Selain itu, survei menunjukkan bahwa banyak warga Korea Selatan melihat Islam sebagai sesuatu yang tidak cocok dengan nilai-nilai Korea. Misalnya, dalam survei terkait kebijakan pengungsi dan keimigrasian, sebagian besar warga menyatakan ketidaksetujuan terhadap penerimaan pengungsi asing dan secara khusus mempertanyakan kompatibilitas ideologi Islam dengan nilai-nilai ideologi masyarakat Korea (The News Lens International Edition).

Secara keseluruhan, sikap anti-multikulturalisme dan nasionalisme etnis di Korea Selatan berakar pada ideologi *danil minjok*, sebuah konsep yang menekankan homogenitas etnis dan budaya bangsa Korea (Lee 1993, Shin 2006). Norma ideologis ini menempatkan kelompok non-Korea, termasuk komunitas

Muslim, sebagai asing permanen dan secara kultural berada di luar identitas nasional. Dalam kerangka kekerasan kultural menurut Galtung, ideologi homogenitas tersebut berfungsi melegitimasi diskriminasi melalui wacana yang membingkai Islam sebagai ancaman budaya atau moral. Bukti empirisnya terlihat pada penolakan pembangunan masjid di Daegu, penggunaan simbol provokatif oleh kelompok warga dan aktivis Kristen konservatif, serta framing media yang mempersepsikan praktik Islam sebagai gangguan terhadap nilai budaya Korea (Cho 2022, Putri et al. 2022 dan Yuk 2025). Dengan demikian, ideologi homogenitas tidak sekadar menjadi konstruksi identitas, tetapi juga menjadi dasar pembenaran kultural bagi tindakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim dalam ruang sosial, politik, dan hukum.

3.3 Kekerasan Kultural dalam Aspek Bahasa

Kemudian poin ketiga adalah kekerasan dalam aspek bahasa Johan Galtung yang merujuk pada penggunaan bahasa sebagai bagian dari budaya yang dapat membenarkan dan melegitimasi kekerasan, baik itu kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Galtung menjelaskan bahwa suatu bahasa itu merupakan kekerasan yang lebih halus dan tidak terlihat secara langsung (Galtung 1990). Bahasa dapat digunakan untuk membingkai tindakan kekerasan agar terlihat wajar, benar atau dapat diterima secara sosial. Misalnya, bahasa yang mendiskreditkan atau mendemonisasi kelompok tertentu dapat membenarkan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka (Habermas, 2000). Aspek kekerasan

kultural bahasa ini merupakan salah satu aspek dasar terciptanya kekerasan budaya yang tidak terlihat tetapi menjadi nyata (Galtung 1990).

Kekerasan kultural pada aspek bahasa terjadi ketika penggunaan bahasa baik pilihan kata, wacana publik, maupun kebijakan linguistik menciptakan atau melegitimasi ketimpangan kekuasaan. Terhadap komunitas muslim di Korea Selatan, hal ini tampak dalam beberapa hal. Pertama, stigmatisasi leksikal muncul lewat istilah bernuansa negatif di media dan percakapan sehari-hari, seperti penyebutan terror, jihadi atau *Arab trouble* yang dilekatkan pada identitas muslim. Istilah-istilah tersebut menanamkan kesan bahwa Islam identik dengan kekerasan atau ancaman keamanan, sehingga diskriminasi dianggap wajar. Kedua, dalam ruang kebijakan dan publik, absennya istilah yang akurat atau positif untuk menyebut komunitas muslim serta kurangnya padanan kata bagi praktik keagamaan seperti halal atau wudhu menciptakan kesalahpahaman dan menormalisasi pengabaian kebutuhan religius. Semua praktik ini menunjukkan bagaimana bahasa, sebagai instrumen budaya, bukan hanya alat komunikasi tetapi juga sarana yang menjustifikasi dominasi mayoritas atas minoritas, sesuai dengan konsep kekerasan kultural Galtung (Cho 2022, Lee & Kim 2023). Dalam aspek kekerasan bahasa yang merupakan aspek yang tidak hanya sekedar tata bahasa saja melainkan sesuatu yang bisa dikuasai oleh kelompok orde baru yang tidak memilih pihak seperti dari umat lain dan sejenisnya sebagai bagian dari mereka. Pada kasus yang terjadi terhadap komunitas muslim yang ada di Korea Selatan, sulitnya berkomunikasi menjadikan keterlambatan bagi komunitas muslim dalam melakukan aktivitas sosial di lingkungan Korea Selatan. Para komunitas muslim yang ada di Korea Selatan sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas

tentang keadaan negara pada media pemerintah Korea Selatan dan sering kali mendapatkan penghinaan atas identitas mereka oleh konservatif Korea Selatan setiap harinya (Reddy dan Kang 2019).

Media massa di Korea Selatan tentunya memiliki peran signifikan dalam membentuk representasi negatif terhadap komunitas muslim. Seperti dalam jurnal Kim (2021) yang menegaskan bahwa media arus utama di Korea Selatan terutama surat kabar konservatif seperti Chosun Ilbo dan Dong-A Ilbo sering menggunakan diksi yang memuat bias ideologis, misalnya menyebut umat muslim sebagai kelompok berisiko, kelompok bermasalah, atau kelompok yang sulit beradaptasi dengan budaya Korea. Citra negatif ini juga terlihat dalam pemberitaan mengenai pembangunan tempat ibadah, terutama di Daegu dan Seoul. Liputan media lokal sering kali lebih menyoroti penolakan warga ketimbang suara komunitas muslim itu sendiri, sehingga framing berita memperkuat kesan bahwa kehadiran muslim adalah sumber konflik sosial (Al Jazeera, 2023, The Korea Herald 2023). Selain itu, juga ada beberapa portal berita daring dan forum publik seperti *Naver News Comments* dan *DC Inside* yang menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian berbasis agama, yang diperkuat oleh pemberitaan sensasional. Dampaknya, media bukan hanya mencerminkan prasangka sosial, tetapi juga mengukuhkan kekerasan kultural yakni ketika simbol dan wacana digunakan untuk menormalkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Galtung, 1990).

Adanya stereotip dalam identitas komunitas muslim di lingkungan Korea Selatan, terlebih dalam berkomunikasi yang merupakan wujud utama dalam melakukan aktivitas sosial di Korea Selatan, menjadikan komunitas muslim sudah

pasti akan mendapatkan stereotip negatif tersebut. Sikap homogenitas yang dibawa secara sosial oleh masyarakat Korea Selatan juga telah menjadikan komunitas muslim ketakutan akan latar belakang identitas mereka. Hal ini tentunya menjadi dilema baru untuk para komunitas muslim dalam bertahan hidup di lingkungan Korea Selatan (Vinesha Anindita 2020). Komunitas muslim di Korea Selatan juga kerap menerima label dan stereotip negatif yang terbentuk melalui kombinasi media, wacana keagamaan dan konstruksi sosial pasca-peristiwa global seperti 9/11. Dalam persepsi umum masyarakat Korea, komunitas muslim sering kali digambarkan sebagai kelompok asing, kelompok berbahaya atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai Korea. Label semacam ini mencerminkan bentuk *othering* yaitu proses sosial yang memposisikan kelompok tertentu sebagai yang berbeda dan tidak termasuk dalam tatanan sosial dominan (Chung, Asian 2020).

Secara lebih spesifik, komunitas muslim sering dikaitkan dengan citra kelompok teroris, kelompok kekerasan dan kelompok ekstremisme, terutama akibat pemberitaan media yang bias dan narasi Barat yang diadopsi oleh media Korea. Misalnya, seperti studi oleh Hyein Kim (2021) menunjukkan bahwa media Korea kerap menampilkan Islam dalam konteks politik dan konflik, tanpa menyoroti sisi sosial atau spiritualnya. Hal ini memperkuat kesan bahwa Islam identik dengan kekerasan, sehingga komunitas muslim dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, komunitas muslim juga sering mendapatkan label sebagai kelompok yang tidak bisa berasimilasi atau terlalu berbeda secara budaya,

terutama karena cara berpakaian seperti hijab dan kebiasaan makan halal (Park, Korea Observer, 2022).

Di sisi lain, sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan kelompok Kristen konservatif yang menggambarkan Islam sebagai agama yang mengancam moral dan tatanan budaya Korea. Narasi seperti “Islam menyebar terlalu cepat” atau “masjid adalah ancaman ideologis” sering digunakan untuk menolak pembangunan fasilitas keagamaan muslim (Al Jazeera, 2023). Akibatnya, komunitas muslim tidak hanya mengalami diskriminasi sosial, tetapi juga stigmatisasi simbolik yang mana identitas Islam mereka menjadi tanda bahaya dalam pandangan masyarakat umum. Dalam kerangka teori Johan Galtung (1990), fenomena ini mencerminkan kekerasan kultural, dikarenakan simbol dan narasi budaya digunakan untuk melegitimasi diskriminasi struktural terhadap komunitas muslim.

Melalui bahasa, pandangan dan sikap yang mendukung kekerasan dapat diinternalisasi oleh individu dan masyarakat sehingga kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang normal atau bahkan diperlukan. Bahasa juga bisa digunakan untuk mengaburkan fakta kekerasan sehingga tidak dikenali sebagai kekerasan, misalnya dengan bahasa euphemisme (halus) yang mereduksi kesadaran akan adanya kekerasan. Dengan demikian, bahasa dalam aspek kekerasan kultural bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat ideologis dan simbolik yang menguatkan struktur kekerasan dan ketidakadilan dalam masyarakat (Tejomukti dan Sasongko 2022).

Dalam contoh atau kasus lain yaitu seperti protes terhadap pembangunan tempat ibadah, yang merupakan salah satu contoh kasus paling nyata adalah kasus pembangunan masjid di kota Daegu. Warga memprotes pembangunan tempat ibadah ini dengan alasan-seperti gangguan lalu lintas, kebisingan, atau perubahan karakter lingkungan (Tejomukti dan Sasongko 2022). Lontaran, cacian serta provokasi dan tindakan secara langsung pun terjadi, kemudian juga terdapat spanduk dan slogan dengan bahasa islamofobia lainnya seperti sebuah banner yang bertuliskan *“Just like Europe, if (this) area becomes Muslim-concentrated, with slums and minimal public order, who will take responsibility?”* yang dipasang di lingkungan sekitar masjid yang hendak dibangun di Daegu. Hal ini menunjukkan bentuk adanya gambaran islamofobia yang menunjukkan stereotip negatif dan prasangka terhadap komunitas muslim. Spanduk semacam ini menegaskan stigma keliru yang menyamakan Islam dengan teroris, sehingga menimbulkan diskriminasi dan ketegangan sosial (Putri, Alunaza, Shafitri dan Ernianda 2022).

3.4 Kekerasan Kultural dalam Aspek Seni

Selanjutnya poin keempat adalah kekerasan kultural dalam aspek seni Johan Galtung yang merujuk pada bagaimana seni, mitos, cerita dan simbol budaya dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dan pembenaran kekerasan dalam masyarakat. Galtung menjelaskan aspek seni dengan meng highlight satu poin utama terkait bagaimana Eropa memahami dirinya sendiri sebagai penyangkalan dari lingkungan non-Eropa atau musuh di selatan dan tenggara. Dalam pikiran Eropa untuk mengatasi lingkungan muncul despotisme oriental atau sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak berperasaan. Pangeran Eropa yang berlaku sewenang-wenang seperti membunuh, mencabuli gadis-gadis petani dan tidak dibatasinya kaum muslim oleh monogami Kristen. Hal ini pada dasarnya dalam aspek seni bisa menjadi objek kekerasan ketika suatu karya seni tersebut menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif (Galtung 1990).

Kekerasan kultural pada aspek seni muncul ketika representasi budaya baik dalam film, drama, webtoon, maupun produk kreatif lain mewajarkan atau menormalisasi diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Bagi komunitas muslim di Korea Selatan, hal ini tampak melalui minimnya representasi positif dalam industri hiburan yang sangat dominan secara global. Karakter muslim hampir tidak pernah muncul dalam drama Korea (*K-drama*) atau film arus utama, sekalipun hadir, sering digambarkan dengan stereotip negatif seperti sosok Arab kaya raya, pejuang ekstremis atau figur eksotis yang berbeda total dari masyarakat Korea. Ketidakhadiran ini memperkuat pandangan bahwa muslim bukan bagian dari identitas nasional maupun kehidupan sehari-hari Korea. Kritik juga muncul

pada penggunaan unsur budaya Islam atau Arab hanya sebagai ornamen eksotis dalam video musik atau fashion, tanpa pemahaman makna religiusnya, yang bagi sebagian muslim terasa sebagai bentuk apropriasi budaya. Dengan cara ini, seni dan budaya populer di Korea Selatan menjadi instrumen halus yang menormalkan pengucilan, karena publik lebih terbiasa dengan stereotip daripada realitas kehidupan muslim di Korea.

Pola ini selaras dengan konsep Galtung, di mana seni berfungsi sebagai medium kultural yang melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan struktural dan diskriminasi simbolik terhadap kelompok minoritas (Cho 2022). Dalam pengertian ini, seni bukan sekadar hiburan atau ekspresi estetis, tetapi juga bagian penting dari sistem kultural yang melegitimasi struktur dan praktik kekerasan di masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan dalam aspek seni dan budaya juga penting dalam upaya mereduksi kekerasan kultural dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Di era digital seperti saat ini dengan berkembangnya media hiburan dan platform media sosial yang berbagai macam menjadi sebuah industri kreatif yang dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara yang mudah dan cepat serta dapat menjadi salah satu sumber penghasilan (Lee & Kim 2023).

Kekerasan kultural dalam aspek seni yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim, seperti yang dikatakan Galtung dalam tulisannya bahwa sebuah karya seni dapat menjadi objek kekerasan ketika menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif (Galtung 1990). Dalam hal ini menampilkan gambaran negatif dan stereotip radikal terhadap muslim, seperti menyebut kelompok muslim sebagai teroris, memperkuat narasi ujaran kebencian dan diskriminasi secara tidak langsung, hal ini dapat dikatakan

sebagai kekerasan kultural terhadap komunitas muslim dalam aspek seni, karena sebagai pelaku seni atau aktor yang berada dalam industri hiburan. Hal ini membuat adanya objektifikasi terhadap komunitas muslim dalam industri hiburan atau seni yang mana hal ini pada akhirnya memunculkan stigma negatif di masyarakat terhadap komunitas muslim (Lee & Kim 2023). Media sebagai arus utama di Korea Selatan bersama organisasi mayoritas Kristen konservatif juga memainkan peran signifikan dalam membentuk citra Islam yang negatif. Ghazi, Fathil & Deliana (2023) menyatakan bahwa media dan kelompok keagamaan mayoritas tersebut menyebarkan representasi tendensius yang memperkuat stereotype anti komunitas muslim dan mendukung legitimasi sosial di masyarakat Korea (Ghazi, Fathil & Deliana 2023).

Contoh kasus dalam implementasi kekerasan seni yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim sebenarnya tidak banyak ditemukan dalam bentuk karya seni yang secara langsung menyerang komunitas muslim. Namun, terdapat tindakan simbolik terkait dengan ekspresi budaya terhadap agama Islam seperti penggambaran stereotip negatif komunitas muslim dalam media populer dan webtoon di Korea Selatan, yang menggambarkan komunitas muslim sebagai kelompok teroris atau kelompok radikal. Salah satu contohnya adalah dalam salah satu drama yang berjudul *Man Who Dies to Live* yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam drama tersebut, ada salah satu adegan dimana beberapa perempuan berhijab mengenakan bikini dan adegan lain yang menunjukkan pemeran utama menginjakkan kaki di dekat kitab suci Al-Qur'an. Banyak masyarakat muslim yang menilai bahwa film ini mereduksi

simbol-simbol Islam menjadi atribut visual eksotik tanpa memahami makna spiritual dibaliknya (Park 2020).

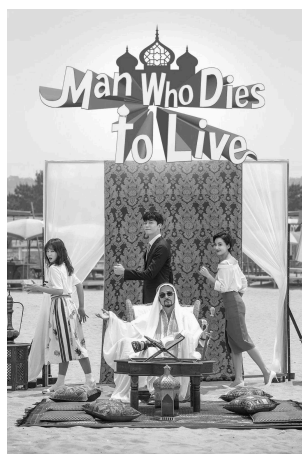
Contoh lain juga terdapat pada salah satu drama yang berjudul *The K2*, di dalam drama ini ada seorang karakter muslim bernama Raniya yang melepas hijabnya dan kemudian berciuman dengan dengan pemeran utama. Adegan ini mendapat banyak kritikan karena menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat muslim terkait hijab dan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan (Cho 2022). Kekerasan kultural ini tidak hanya menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap budaya lain, tetapi juga memperkuat persepsi keliru tentang Islam sebagai agama yang bisa dengan mudah disesuaikan untuk kepentingan narasi hiburan. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat jelas bahwa sebagian produk budaya yang di produksi oleh Korea Selatan masih mengandung unsur kekerasan kultural yang mendiskriminasi komunitas muslim. Reduksi simbol-simbol agama dan penggambaran stereotip negatif bukan hanya akan memperkuat islamofobia secara tidak langsung, tetapi juga menciptakan ketegangan budaya di tingkat global, terutama mengingat luasnya jangkauan internasional media Korea Selatan (Cho 2022).

Gambar 3. Webtoon di Korea Selatan yang menggambarkan komunitas muslim sebagai kelompok teroris



Sumber : Youtube/KST By The Korea Times

Gambar 4. Beberapa scene drama dalam film Man Who Dies to Live, beberapa perempuan berhijab mengenakan bikini dan adegan lain yang menunjukkan pemeran utama menginjakkan kaki di dekat kitab suci Al-Qur'an.



Sumber : Kapanlagi.com

Gambar 5. Salah satu scene drama dalam film The K2, di mana seorang karakter Muslim bernama Raniya ditampilkan melepas hijabnya dan kemudian berciuman dengan karakter utama



Sumber : Tiktok by dr.amazone

BAB 4

4.1 Kesimpulan

Bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim di Korea terkait dengan fenomena Islamofobia pada tahun 2017–2022 terjadi sebagai akibat dari kombinasi diskriminasi sistemik, eksklusi sosial kekerasan verbal dan simbolis serta persepsi negatif yang diperkuat oleh media. Fenomena Islamofobia ini mencerminkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh komunitas muslim dalam memperoleh hak yang setara serta dalam membangun kehidupan yang aman dan bebas dari prasangka di tengah masyarakat Korea Selatan yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai Islam dan umat muslim.

Bangkitnya Korea Selatan dari keterpurukan menjadi negara maju yang berkembang sangat cepat dalam beberapa aspek kehidupan, membuat masyarakat Korea menjadi lebih mudah dalam menjalani kehidupan saat ini. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara yang begitu pesat, isu kekerasan di Korea Selatan menjadi salah satu masalah yang serius di Korea Selatan. Isu ini merupakan suatu hal yang marak dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini isu kekerasan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Galtung dalam konsepnya terdapat tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Ketiga konsep ini memiliki pengertian yang berbeda tetapi masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Berbicara mengenai kekerasan yang dialami komunitas muslim di Korea Selatan, kekerasan ini termasuk ke dalam kekerasan kultural Johan Galtung. Kekerasan kultural merupakan suatu sikap yang berlaku atau keyakinan terhadap sesuatu

yang berkaitan dengan kekerasan dan kekuasaan yang telah diajarkan sejak kecil dan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pemanfaatan nilai-nilai budaya dan sejarah masa lalu sebagai salah satu alasan dari adanya tindakan yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan kultural yang terjadi terhadap komunitas muslim di Korea Selatan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2022 merupakan fenomena yang kompleks dan berlapis, yang muncul dari interaksi antara faktor agama, ideologi, bahasa dan seni. Dengan menggunakan teori *Cultural Violence* dari Johan Galtung (1990) sebagai kerangka analisis, peneliti menyoroti bahwa kekerasan terhadap komunitas muslim tidak selalu hadir dalam bentuk fisik atau struktural yang tampak, melainkan juga dalam bentuk simbolik dan kultural yang melekat dalam nilai, norma dan kebiasaan masyarakat Korea Selatan. Kekerasan semacam ini menjadi lebih berbahaya karena bersifat tidak disadari dan dilegitimasi secara sosial, sehingga melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tanpa perlu pembenaran eksplisit.

Kemudian juga ditemukan bahwa faktor agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pola kekerasan kultural. Sebagian kelompok masyarakat Korea Selatan, khususnya dari kalangan Kristen konservatif, menggunakan argumentasi keagamaan untuk menolak kehadiran umat Muslim dan praktik keagamaan mereka. Doktrin keagamaan sering kali dijadikan dasar legitimasi bagi tindakan diskriminatif, seperti penolakan pembangunan masjid di Daegu pada tahun 2020–2022, yang disertai dengan aksi simbolik berupa

pemasangan kepala babi dan spanduk berisi ujaran kebencian. Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan yang semestinya menjunjung kasih dan toleransi justru disalahgunakan untuk memperkuat batas identitas kelompok kami dan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama, ketika dikaitkan dengan ideologi etnosentris dan rasa superioritas budaya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kekerasan kultural.

Selain agama, faktor ideologi nasionalisme etnik masyarakat Korea Selatan juga menjadi elemen penting dalam konstruksi kekerasan kultural. Gagasan *danil minjok* atau bangsa tunggal yang menekankan homogenitas ras, bahasa dan budaya, telah mengakar kuat dalam identitas nasional masyarakat Korea Selatan. Ideologi ini menimbulkan eksklusi terhadap kelompok asing, termasuk umat Muslim, yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional. Dalam konteks ini, Islam dianggap sebagai unsur luar yang mengancam kemurnian budaya Korea. Bentuk kekerasan ideologis ini tampak dalam pernyataan publik, kebijakan sosial serta sikap masyarakat yang secara halus menolak integrasi umat Muslim ke dalam kehidupan sosial. Diskriminasi tersebut menimbulkan keterasingan sosial dan membatasi ruang partisipasi komunitas Muslim dalam ranah publik.

Penelitian ini juga mengidentifikasi aspek bahasa sebagai salah satu medium utama penyebaran kekerasan kultural. Bahasa memiliki kekuatan simbolik yang dapat membingkai persepsi masyarakat terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks masyarakat Korea Selatan, istilah-istilah seperti teroris, jihadi, atau ancaman Arab sering digunakan di media dan percakapan sehari-hari untuk menggambarkan bagaimana umat muslim. Penggunaan istilah ini tidak

hanya mendiskreditkan kelompok minoritas, tetapi juga menormalisasi pandangan bahwa Islam identik dengan kekerasan dan ekstremisme. Bahasa dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen ideologis yang melegitimasi diskriminasi, sehingga kekerasan menjadi tampak wajar dan dapat diterima secara sosial. Kekerasan dalam bentuk bahasa ini merupakan salah satu wujud paling halus dari *Cultural Violence* yang dijelaskan oleh Galtung dan merupakan sebuah kekerasan simbolik yang tidak terlihat, tetapi mengakar dalam sistem komunikasi masyarakat.

Selain itu, aspek seni pun juga turut memperkuat konstruksi kekerasan kultural terhadap umat Muslim di Korea Selatan. Representasi negatif terhadap Muslim sering muncul dalam produk budaya populer seperti film, drama, webtoon dan pemberitaan media. Karakter Muslim kerap digambarkan sebagai sosok ekstremis, keras atau bahkan berbahaya, yang memperkuat stereotip islamofobia di kalangan masyarakat Korea Selatan. Representasi semacam ini berperan penting dalam membentuk opini publik, terutama di negara yang masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh media seperti Korea Selatan. Melalui narasi budaya yang bias, masyarakat secara tidak sadar menyerap pandangan negatif terhadap umat Muslim, sehingga diskriminasi dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat dibenarkan.

Secara keseluruhan kekerasan kultural yang terjadi di Korea Selatan bekerja melalui nilai, norma dan kebijakan yang tampak netral, tetapi sesungguhnya menegaskan dominasi kelompok mayoritas dan menyingkirkan minoritas. Kekerasan ini menjadi landasan yang memungkinkan munculnya kekerasan struktural dan langsung, seperti pembatasan ruang ibadah, pengucilan sosial, hingga ujaran kebencian di ruang publik. Dengan demikian, kekerasan

kultural bukan hanya sekadar latar belakang, tetapi juga menjadi mekanisme yang terus-menerus mereproduksi intoleransi dalam masyarakat. Meskipun demikian, dalam penelitian ini juga mencatat adanya perkembangan positif di akhir periode penelitian. Pemerintah Korea Selatan saat ini telah mulai menunjukkan perhatian terhadap keberadaan komunitas muslim melalui kebijakan Muslim-friendly, seperti sertifikasi halal dan promosi wisata religi. Langkah-langkah ini, meskipun masih terbatas, menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberagaman budaya merupakan aset sosial yang harus dihargai. Upaya ini juga mencerminkan adanya perubahan paradigma dari eksklusivitas menuju inklusivitas dalam masyarakat Korea Selatan modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam membangun kesadaran multikultural serta menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama kekerasan simbolik yang sering kali tersembunyi di balik legitimasi budaya dan moralitas sosial.

Secara konseptual, hasil dari penelitian ini memperkuat konsep pemikiran dari Johan Galtung bahwa kekerasan kultural merupakan akar dari kekerasan lainnya dan memiliki peran penting dalam mempertahankan sistem ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya menghapus kekerasan terhadap komunitas Muslim di Korea Selatan tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan hukum atau ekonomi, melainkan harus melibatkan transformasi budaya dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap keberagaman. Kesadaran ini menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih adil, toleran, dan menghargai perbedaan.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang hendak melanjutkan penelitian mengenai bentuk-bentuk kekerasan kultural masyarakat Korea Selatan terhadap komunitas muslim terkait dengan fenomena islamofobia adalah dengan melakukan analisis perbandingan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait komunitas muslim, yang kemudian ditelusuri perubahan kebijakan dari tahun ke tahun untuk melihat tren dan respons pemerintah terhadap isu islamofobia dan sertakan analisis terhadap kebijakan imigrasi, pendidikan serta kebebasan beragama yang berdampak langsung pada komunitas muslim. Tentunya besar harapan, jika terdapat penelitian selanjutnya nanti dapat memperkaya literatur terkait serta berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama di Korea Selatan. n.d. Ensiklopedia Dunia. Accessed Januari 30, 2025.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Agama_di_Korea_Selatan.
- Alestiklal. (2021). *South Korea pushes Muslim community to complaint to the UN*.
<https://www.alestiklal.net/en/article/south-korea-pushes-muslim-community-to-complaint-to-the-united-nations>
- Alfarajat, Loai. 2022. "Halal Food and Medical Tourism: Muslim Patients' Experiences and Satisfaction in South Korea." *Journal of Religion and Health*, October. <https://doi.org/10.1007/s10943-022-01727-x>.
- Alhuzaini, M. M., Nelmawarni, & Erman. (2024). Jejak Islam di Korea Selatan: Sejarah Panjang, Dakwah, dan Perkembangan Komunitas Muslim. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 3(1), 49–58.
- Al Jazeera. "The Muslims of South Korea." *Al Jazeera*, November 15, 2017.
- Anisa, Darania. 2020. *Hegemoni Wacana Islamophobia*. Edited by Guapedia. N.p.: Guapedia.
- Arab News. (2019). *Islam in South Korea*.
<https://www.arabnews.pk/node/1498891/world>
- Azizah, Ulfah, and Mochammad Fathoni. 2022. "Strategi Korea Tourism Organization (KTO) dalam Mempromosikan 'Wisata Halal' di Korea Selatan." *Jurnal Sosial Politik Peradaban* Vol 3 (No 1): 39-60.
- Burhan, Amelia. 2024. "Diskusi Tren Wisata Halal dan New Southern Policy di Korea Selatan: Promosi, Prospek dan Konsumerisme Agama." *Jurnal Multikultura* Volume 3, no. Number 2 (1): 251-265.

- Cho, Y. "Islamophobia in South Korea: Media, Politics, and the Construction of the Muslim 'Other.'" *Asian Journal of Social Science* 50, no. 4 (2022): 385–406. <https://doi.org/10.1163/15685314-bja10065>.
- Chung, Edward YJ. 2015. *Korean Confucianism: Tradition and Modernity*. Korea: The Academy of Korean Studies Press. 2022.
- Damayanti, Angel, Verdinand R. Siahaan, and Darynaufal Mulyaman. 2022. "Islamophobia in Indo-Pacific Countries and the Roles of Regional Organization." *International Journal of Advanced Research (IJAR)* Vol. 10, no. No. 12 (December): 218-230. 10.21474/IJAR01/15830.
- Diansyah, Agus. 2014. "Meneropong Jejak Islam Korea Selatan." <https://www.kmamesir.org/2014/03/meneropong-jejak-islam-korea-selatan.html>.
- Faizi, Lutfan. 2022. *Agama Warga Negara Korea Selatan dan Persentasenya*. International, Jakarta : sindonews.com
- Fourteenth Oic Report on Islamophobia December 2020-January 2022*. 2022. N.p.: Islamabad The Islamic Republic of Pakistan.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* Vol 27, no. No 3 (August): 291-305.
- Handayani, Rossi, and Nashih Nasrullah. 2021. "Islam di Korea Selatan, Tampak Damai Tapi Hadapi Islamofobia." [Khazanah.republika.co.id](https://khazanah.republika.co.id). <https://khazanah.republika.co.id/berita/r0h5i9320/islam-di-korea-selatan-tampak-damai-tapi-hadapi-islamofobia>.

- Han, Sang Y. 2017. "Islamophobia in South Korea With a focus on Muslim migrants." *American University in Cairo AUC Knowledge Fountain*, (January), 1-99. <https://fount.aucegypt.edu/etds/587>.
- Hernandez, Carolina G., Eun M. Kim, Yoichi Mine, and Ren Xiao, eds. 2018. *Human Security and Cross-Border Cooperation in East Asia*. N.p.: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6>.
- "Heboh Islamophobia Korsel, Pembangunan Masjid 'Dilempar' Babi." 2022. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221227161759-4-400564/heboh-islamophobia-korsel-pembangunan-masjid-dilempar-babi>.
- Hilwa, Nola. 2021. "South Korea's Muslim Friendly Tourism Program as Public Diplomacy in 2015-2019." *Mediasi: Journal of International Relations* 4:1– 12.
- Human Rights Watch. (2022). *Freedom of religion or belief in South Korea: Cases of discrimination*.
- Jaehyon, Lee. 2019. "Korea's New Southern Policy: Motivations of 'Peace Cooperation' and Implications for the Korean Peninsula." *Journal The Asan Institute for Policy Studies Issue Brief*, (7), 1-19.
- Ji-Hye, Shin. 2021. "[Us and Them] Islamophobia emerges in Korea." *The Korea Herald*. <https://m.koreaherald.com/article/2700048>.
- Jung, Y. (2022). *Mosque construction and community resistance in Daegu: Local protest movements and symbolic conflict*. *Seoul Social Science Review*, 23(1), 75-95.

- Karisma, Gita. 2023. "Keamanan Manusia di Lampung: Dilema Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Ragam Ancaman Keamanan." *jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id* Volume 11, no. NO. 2 (Agustus): 161-176.
- Kemenag RI. (2023). *BPJPH lakukan asesmen lembaga halal Korea Selatan*. <https://m.kemenag.go.id>
- Kim, H. "National Identity and Multicultural Policy in South Korea: Between Homogeneity and Diversity." *Asian Ethnicity* 24, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.1080/14631369.2022.2035865>.
- Kim, Nadia Y. 2018. "Korean Multiculturalism and the Framing of Foreign Influence." *Social Sciences*.
- Kim, S., & Choi, H. (2021). *Halal food access and religious practice among Muslim minorities in urban South Korea*. *Asian Journal of Cultural Studies*, 8(2), 112-128.
- Koo, Gi Yeon. 2018. "Islamophobia and the Politics of Representation of Islam in Korea." *Journal of Korean Religions* 9 (1): 159–62. <https://doi.org/10.1353/jkr.2018.0006>.
- Korea Exposé. (2022). *How influential is Islam in South Korea?* <https://koreaexpose.com>
- Korea Human Rights Commission. (2021). *Annual report on religious minorities in Korea*.
- Korea Human Rights Commission. (2022). *Annual report on religious freedom and minority rights*.

- Korea Muslim Federation (KMF). *Population and Community Statistics Report*. Seoul: KMF, 2019.
- Korea Times. “Daegu Mosque Protests Discriminatory: Human Rights Commission.” *The Korea Times*, February 6, 2025.
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/02/113_316326.html.
- Kurnialam, Alkhaledi, and Nashih Nashrullah. 2022. “Korea Selatan, Kiblat K-Pop dan Teknologi yang Hadapi Islamofobia Ganas.” *Republika*.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/r89lbn320/korea-selatankiblat-kpop-dan-teknologi-yang-hadapi-islamofobia-ganas>.
- Lee, Hee-Soo, and Joh Young-Joo. *Politik Islam Empirik*. Seoul: Research Center for Islamic Studies, 2012.
- Lee, J. (2019). *Challenges of foreign students in South Korean universities: facilities, services, and cultural inclusion*. *Journal of International Education Studies*, 12(3), 45-60.
- Lee, Kwang-Kyu. 1993. “Cultural Nationalism in Contemporary Korea.” *Journal of Asian Studies*.
- Lee, S., and H. Kim. “Contesting the Daegu Mosque: Religion, Space, and Local Resistance in South Korea.” *Journal of Contemporary Asia* 53, no. 2 (2023): 215–233. <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2093090>.
- Lie, John. 2014. “Multicultural Korea? Multiculturalism, Migration, and Peoplehood Diversity in Contemporary South Korea.” *Journal of Korean Studies*.

- Luthfiyyah, Salsa F. 2022. "Analisis fasilitas wisata Halal di Korea Selatan: Studi kasus Seoul Central Mosque." *Journal of Halal Industry Studies* 1 (2): 68-77.
- Marlinda, Ajeng Puspa, Bambang Cipto, Faris Al-Fadhat, and Hasse Jubba. 2021. "South Korea's Halal Tourism Policy - The Primacy of Demographic Changes and Regional Diplomacy." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10 (3): 253-63. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0081>.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Minardi, Anton. 2011. "Islam dan Toleransi di Korea Selatan." *Korean Studies in Indonesia an International Journal* Vol II, no. No 1 (April): 72-80.
- Moordiningsih. 2004. "Islamophobia dan Strategi Mengatasinya." *Jurnal Buletin Psikologi*, no. No 2, 73-84.
- Muguruza, Cristina C. 2017. "Human Security as a policy framework: Critics and Challenges." *Journal of Human Rights*, (December), 16-35.
DOI:10.18543/aahdh-4-2007pp15-35.
- Mukhtar, Umar, and Agung Sasongko. 2021. "Korea Selatan, Islam, dan Tantangan Multikultural." [ihram republika.co.id](http://ihram.republika.co.id).
<https://ihram.republika.co.id/berita/r0i6ql313/korea-selatan-islam-dan-tantangan-multikultural-part3>.
- Musafak, Muhammad. 2024. "Jalan Terjal Korea Selatan Menuju Samudera Biru Industri Halal." *Masyarakat Ekonomi Syariah*.
<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2024/08/korea-selatan/>.

- National Law Information Center. (2023). *Constitution of the Republic of Korea, Article 20*. <https://elaw.klri.re.kr> .
- Noh Se Ik, A. S., Jazuli, S., Rohmah, S., & Chanifah, N. (2024). Principles of Islam and Social Integration: *A Conceptual Framework for Promoting Peaceful Coexistence in South Korea*. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.146>.
- Nurhalisa, Siti. 2021. “Sejarah Islam di Korea Selatan (2001-2019).”
- Organisation of Islamic Cooperation (OIC). *Muslim Communities in Non-OIC Member States*. Jeddah: OIC Islamophobia Observatory, 2019.
- Paradays, Nabila. 2022. “Potret Komunitas Muslim di Korea Selatan: Studi kasus Korea Muslim Federation (KMF), 1990-2020.” *Journal of Islamic Social History* Vol. 1 (No. 2): 103-126.
- Park, M. (2020). *Media portrayal of Muslims in South Korea: Security, Threat, and Othering*. *Korean Journal of Media Studies*, 15(4), 301-320.
- Pew Research Center. “Muslim Population Growth and Projections.” 2021. <https://www.pewresearch.org>.
- Populasi Korea Selatan 2025. (2025-09-23). World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/countries/south-korea>
- Putri, Anggi, Hardi Alunaza, Desy N. Shafitri, and Annisa Ernianda. 2022. “Peningkatan Eksistensi Budaya Islamofobia dalam Kehidupan Masyarakat Korea Selatan (Studi Kasus: Tindakan Penolakan Masyarakat Setempat Terhadap Pembangunan Masjid).” *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 16, no. No. 2 (Maret): 527-541.

- Putri, Sahar Banu R. 2020. "Islamofobia di Kalangan Masyarakat Barat dan Implikasinya terhadap Umat Islam Jerman dan Amerika Serikat.." (Juli), 1-104.
- Rachmah, A. N., & Jahroni, J. (2022). Dinamika Keislaman di Korea Selatan: Studi Kasus Komunitas Muslim Indonesia (KMI) 2007-2020. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 3(2).
<https://doi.org/10.15408/sh.v3i2.38050>
- Rahmat, Unang. 2018. "Korean Moslem Federation (KMF); Secerca Harapan di Tengah Kehampaan Spiritual Korea Selatan." *Pendis Kemenag*.
<https://pendis.kemenag.go.id/read/korean-moslem-federation-kmf-secerca-h-harapan-di-tengah-kehampaan-spiritual-korea-selatan>.
- Republika. (2021). *KMF gulirkan aktivitas dakwah di Korea*.
<https://khazanah.republika.co.id>
- Ridhotullah, M. D. 2023. "Pembangunan Masjid Kecil Pertaruhan Kebebasan Beragama Korea Selatan." *Inilah.com*.
<https://www.inilah.com/pembangunan-masjid-kecil-pertaruhan-kebebasan-beragama-korea-selatan>.
- Salim, M. Abdulloh, Qudwatul Aimmah, and Harum I. Puspa Sari. 2023. "Islam di Finlandia Antara Kebebasan dan Diskriminasi." *Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam dan Living Qur'an* Vol 2, no. No. 01 (Juni): 60-78.
- Samsudin, Abu. 2022. "The Development of Halal Tourism in Muslim Minority Countries: Case Study in South Korea." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (Desember): 00055. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.70>.

- Sakinah, Nur, and Eka Kurniawati. "Understanding the Human Rights Discrimination of South Korea Muslims." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 28, no. 2 (2024): 55–71.
<https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12272>.
- Sang Taek Lee. 1946. "*Religion and Social Formation in Korea: Minjung and Millenarianism*." Walter de Gruyter & Co, 1996. ISBN 3-11-014797-1
- Seol, Dong-Hoon, dan John Skrentny. 2009. "Ethnic Return Migration and Hierarchy of Foreign Workers in Korea." *Ethnicities*.
- Sheikh, Farrah. 2019. "Exploring 'Korean Islam' in a Climate of Exclusion and Islamophobia." *International Journal of Diaspora&Cultural Criticism* 9 (2): 72 196–215. <https://doi.org/10.15519/dcc.2019.07.9.2.196>.
- Shin, Gi-Wook. 2006. *Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics, and Legacy*. Stanford: Stanford University Press.
- Srimulyani, Eka. 2021. "Indonesian Muslim Diaspora in Contemporary South Korea: Living as Religious Minority Group in Non-Muslim Country." *Samarah* 5 (2): 668–88. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9733>.
- Subroto, Lukman H., and Widya L. Ningsih. 2022. "Sejarah Islam di Korea Halaman all." Kompas.com.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/09/140000179/sejarah-islam-di-korea?page=all>.
- Tejomukti, Ratna A., and Agung Sasongko. 2022. "Warga Korsel Tolak Pembangunan Masjid, Islamofobia atau Xenofobia?" *Republika*.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/r84ak2313/warga-korsel-tolak-pembangunan-masjid-islamofobia-atau-xenofobia>.

- The Korea Times. (2021). *Daegu mosque dispute highlights limits of Korea's religious tolerance*. <https://www.koreatimes.co.kr>
- The Korea Times. (2022). *Korea still grappling with acceptance of Muslim residents*. <https://www.koreatimes.co.kr>
- The Role of Mainstream Media and Christian Organisations in Shaping South Korean Views on Islam and Muslims: A Historical Study.” *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 8, no. 1 (2023). <https://al-irsyad.uis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/366>.
- UIN Sunan Kalijaga. (2022). *Peran KMF dalam pengembangan Islam di Korea*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Umayyatun, Siti. 2017. “Masyarakat Muslim di Korea Selatan: Studi tentang Korea Muslim Federation (KMF) tahun 1967-2015 M.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* Vol 11 (No 2): 135-156.
- U.S. Department of State. *International Religious Freedom Report: South Korea*. Washington, D.C.: Office of International Religious Freedom, 2019.
- Wazier, Raihan R. 2023. “Islamofobia di Korea Selatan: Cara Pandang Masyarakat Korea terhadap Islam dan Perilaku Islamofobia.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*.
- Widayanti, Ni Nyoman Wira. 2021. “Kampanye Muslim Friendly Korea, Cara Korea Gaet Wisatawan Indonesia Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Kampanye Muslim Friendly Korea, Cara Korea Gaet Wisatawan Indonesia.” Kompas.Com. June 16, 2021. <https://travel.kompas.com/read/2021/06/16/224237527/kampanye-muslimfriendly-korea-cara-korea-gaet-wisatawan-indonesia>.

- Yi, S., & Koo, G. Y. (2025). *Beyond Islamophobia: Unpacking Economic Motivations in South Korea's Mosque Construction Debates*. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 109–141.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.109-141>.
- You, Sukkyung, Euikyung Kim, dan Mirim Kim. 2014. “An Ecological Approach to Bullying in Korean Adolescents.” *Journal of Pacific Rim Psychology* 8 (1): 1–10. <https://doi.org/10.1017/prp.2014.1>.
- Yuk, Joowon (2025) “*The Protestant Right and the Rise of Islamophobia in South Korea*.” *Anthropology of the Middle East* 20, no. 2 (2025): 44–63.